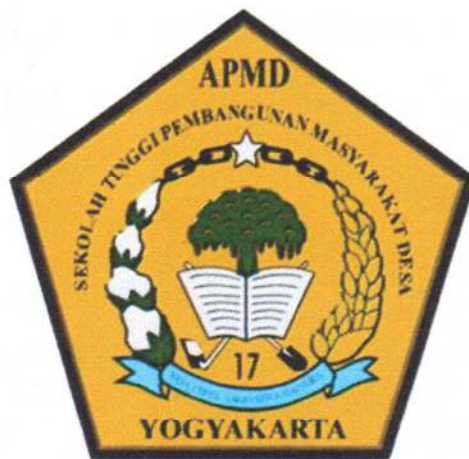


**ANALISIS KRITIS RELASI KUASA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Tentang Kontradiksi Program Desa Maritim di Kalurahan Tileng,
Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**IRENE BERTA MEIDA ZALUKHU
19520123**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



**ANALISIS KRITIS RELASI KUASA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Tentang Kontradiksi Program Desa Maritim di Kalurahan Tileng,
Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

IRENE BERTA MEIDA ZALUKHU

19520123

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 April 2023

Jam : 13:00 – 14:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. Dosen Pembimbing
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A
2. Penguji Samping I
Dr. Sutoro Eko Yunanto
3. Penguji Samping II
Drs. B Hari Saptaning Tyas, M.Si



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rigel Samaloisa

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irene Berta Meida Zalukhu

Nim : 19520123

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS KRITIS RELASI KUASA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Tentang Kontradiksi Program Desa Maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Yang Me



Irene Berta Meida Zalukhu

19520123

MOTTO

“Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
(Yesaya 41 : 10)

“Kesuksesan adalah hasil dari jerih payah”
(Irene Berta Meida Zalukhu)

“Kesulitan itu hanya akan mengganggu mu ketika kamu membiarkannya untuk mengusikmu. Akan tetapi, kesulitan itu akan hilang ketika kamu memperbesar kapasitas mu”
(Merry Riana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah terlibat menggoreskan tinta-tinta emas dalam buku kisah perjalanan maupun proses yang begitu luar biasa yang telah terlewati, sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini:

1. Rasa syukur yang teramat besar saya haturkan kepada Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus, melalui perantara Bunda Maria selalu beserta ku hingga saat ini masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati berkat kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam hidup ku.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta (A/I. Elvis Zalukhu) yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih yang teramat besar hingga saat ini. Berkat doa dan tuntunan mereka saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswi. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta kelancaran dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada Abang (Silvester H. Zalukhu) dan Adek (Raymond T. Zalukhu) yang sangat saya sayangi, selalu memberikan dukungan dan motivasi di setiap proses yang dilalui selama menyelesaikan tugas ini. Semoga kelak kita bisa sukses dan membahagiakan serta menjadi kebanggaan kedua orang tua dan bermanfaat bagi banyak orang.
4. Terimakasih saya ucapkan kepada kekasih tersayang (Raymond A. Halawa, S.I.P) yang selalu setia saat senang maupun susah menjadi partner untuk bertukar pikiran, serta selalu memberikan dukungan dan dorongan agar tidak menyerah

dalam situasi apapun. Doa terbaik untuk kita berdua, semoga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

5. Terimakasih saya ucapkan kepada para sahabat dan teman-teman sejawat yang telah bersama-sama melewati suka-duka selama menjalankan studi di Yogyakarta (Tuti, Ines, Wella, Agnes, Suster Dian dan Kak Sandre) yang selalu sigap dalam memberikan motivasi dan bantuan saat menyelesaikan tulisan ini. Meskipun nanti kita akan berpisah namun cerita panjang yang telah terlewat akan menjadi sejarah perjalanan yang tidak terlupakan.
6. Terimakasih untuk UKM Taekwondo APMD dan Manajemen Black Eagle Indonesia, kepa segenap pelatih (Sabeum Nim Maklon Hatti, Sabem Libertus, dan Sabem Simeon) yang telah turut membentuk karakter dan mental saya menjadi petarung sejati, dan kepada sesama anggota Taekwondo-in terkhusus untuk (Susana Anita dan Grace Lalel) yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan pertarungan yang luar biasa ini.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada Pater Darto dan saudara Verlin Waruwu yang telah membantu dalam memberikan ide/gagasan, serta mengarahkan saya dalam menulis karya ini hingga akhirnya bisa terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS KRITIS RELASI KUASA DALAM PENYENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Tentang Kontradiksi Program Desa Maritim di Kalurahan Tileng, Kapaneweon Girisubo, Gunungkidul, DIY)”** dengan baik. Karya ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Kendati demikian, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan doa, masukan ide/gagasan, dan bimbingan maupun saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini. Maka, dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian karya ini.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam proses perkuliahan selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

5. Bapak Irvan Riyadi, S.I.Kom., M.P.A selaku dosen dan partner dalam bertukar pikiran, sehingga membuka wawasan berpikir dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Segenap Dosen, Staf, dan Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan segala pelayanan yang terbaik selama masa perkuliahan. Semoga APMD semakin jaya dan terus menjadi kampus yang mendidik dan mengayomi.
7. Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan Tileng yang memberikan ruang bagi penulis untuk belajar dan menggali banyak ilmu praktis dan pengalaman, serta telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Arif Budiharja Purnomo Putra selaku Analis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yang mendampingi “Desa Maritim” di Kalurahan Tileng, yang telah bersedia untuk memberikan waktu dan informasi yang mendukung muatan skripsi yang telah diselesaikan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi yang diselesaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk lebih baik dalam membuat karya tulis di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 4 April 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Secara Teoritis	12
2. Secara Praktis	13
F. Kerangka Konseptual.....	13
1. Relasi Kuasa	13
2. Governmentality	17
3. Desa Maritim.....	21
G. Metode Penelitian	28
BAB II	36
PROFIL KALURAHAN TILENG.....	36
A. Sejarah Kalurahan	36
B. Geografis.....	39
C. Demografis.....	41
D. Sosial Ekonomi	46
E. Sosial Budaya.....	50
F. Sarana dan Prasarana	51
G. Pemerintah Kalurahan.....	52
H. Visi Misi.....	53
1. Visi Kalurahan.....	54

2. Misi Kalurahan	54
BAB III.....	56
TEMUAN LAPANGAN	56
A. Mendukung Arah Kebijakan Strategis Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Agenda Keistimewaan.....	56
B. Program Desa Budaya Maritim Sebagai Upaya Mengakselerasi Pembangunan di Kalurahan Tileng.....	65
1. Pemerintah Kalurahan Tileng Dalam Penerapan Program Desa Budaya Maritim.....	65
2. Masyarakat Kalurahan Tileng Dalam Merespon Program Desa Budaya Maritim.....	82
BAB IV	93
MEMBONGKAR KONTRADIKSI PENERAPAN PROGRAM DESA MARITIM DI KALURAHAN TILENG	93
A. Konsep Desa Maritim: Antara Idealisme dan Realitas Implementasi.....	93
B. Melampaui Paradigma Program Desa Maritim: Memahami Kontradiksi Sebagai Dinamika Relasi Kuasa.....	106
1. Program Desa Maritim Dalam Bingkai Pelaksanaan Kebijakan Strategis Gubernur DIY.....	106
2. Relasi Kuasa Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat terhadap Kontradiksi Program Desa Maritim Di Kalurahan Tileng	110
BAB V.....	114
REFLEKSI DAN REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM DESA MARITIM.....	114
BAB VI.....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
PANDUAN WAWANCARA.....	122
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Informan.....	32
Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	42
Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	44
Tabel II. 5 Luas Lahan Masing-masing Kelompok Tani	46
Tabel III. 1 Penjelasan Prioritas Pembangunan DIY 2022-2027	57
Tabel III. 2 Kegiatan Di Tahun 2021	75
Tabel III. 3 Rencana Kegiatan Tahun 2022	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Wilayah Administrasi Kalurahan Tileng.....	40
Gambar II. 2	Peta Penggunaan Lahan di Kalurahan Tileng	47
Gambar III. 1	Tebing Turi yang dijadikan sebagai andalan potensi kelautan “Desa Budaya Maritim” di Kalurahan Tileng.....	67
Gambar III. 2	Bangunan Sekolah Alam Pesisir yang berlokasi di Padukuhan Nanas.....	76
Gambar III. 3	Gedung Rumah Olahan Ikan Laut	77
Gambar III. 4	Pelatihan Kelompok Olahan Kalurahan Tileng	78
Gambar III. 5	Ruko Budaya Maritim yang berlokasi di Padukuhan Teken	79
Gambar III. 6	Pagar Sekolah Alam Pesisir	80
Gambar III. 7	MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang berada di Sekolah Alam	80
Gambar III. 8	Tempat Parkir yang berada di dekat Sekolah Alam Pesisir	81
Gambar III. 9	Pembuatan Talud (embung)	81
Gambar III. 10	Rabat Beton.....	82

INTISARI

Skripsi ini membahas tentang narasi analisis kritis terhadap relasi kuasa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, yang berfokus pada kontradiksi yang muncul dalam penerapan program Desa Maritim di Kalurahan Tileng. Penelitian ini secara mendalam menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault sebagai kerangka analisis utama, dengan pendekatan kritis yang menjadikan perspektif *governmentality* sebagai sumber kritik.

Penelitian ini berlangsung dengan metode Kualitatif Grounded Teori. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam program Desa Maritim, dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Tileng, masyarakat loka, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, data sekunder yang mendukung penguatan data lapangan seperti dokumen kajian Pengembangan Desa Maritim, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tileng, dan laporan administrasi lainnya juga digunakan untuk mendukung analisis peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kesenjangan antara idealisme dari konsep Desa Maritim dengan realita penerapan program tersebut di Kalurahan Tileng. Kendati demikian, argumentasi utama dalam penelitian ini adalah kegagalan pemerintah dalam pembangunan yang terjebak dalam logika proyek. Melalui analisis kritis terhadap relasi kuasa peneliti memberikan refleksi dan rekonstruksi paradigma pembangunan melalui program Desa Maritim.

Kata kunci: Relasi Kuasa, Program Desa Maritim, Governmentality

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa secara sederhana dapat dipahami sebagai pemerintahan terkecil yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengisyaratkan bahwa desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam pemerintahan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan hak asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Desa menjalankan urusan pemerintahan terkait mengatur, mengurus, melayani dan melindungi, sebagaimana diselenggarakan oleh pemerintah desa. Selain itu, desa juga wajib untuk menyelenggarakan pembangunan guna mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah desa bersama dengan segenap elemen masyarakat menjadi landasan utama dalam mewujudkan suatu pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah bangunan kokoh yang adalah relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat lokal sebagai kerangka penting guna menopang penyelenggaraan pembangunan desa.

Sejalan dengan itu, pada dasarnya dinamika pemerintahan desa sekalipun sudah dipayungi oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, ada pula desa yang berada dalam wilayah administrasi dengan Otonomi Khusus seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa dengan sebutan Kalurahan sebagai bentuk kelembagaan asli Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hakikatnya, keberadaan Kalurahan tidak terlepas dari eksistensi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang diakui oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY.

Berangkat dari itu, penugasan urusan keistimewaan terhadap Kalurahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY meliputi Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang, yang diikuti dengan pendanaan dari Dana Keistimewaan yang masuk ke APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan). Desa/Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri. Upaya pembangunan yang akan diselenggarakan di Kalurahan secara tegak lurus dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. Sebab, siklus dan proses kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak mengalami pergantian melalui pesta demokrasi seperti halnya di daerah lain. Maka, dalam penyusunan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjadikan visi misi gubernur sebagai dasar kajian utama guna menentukan strategi dan program-program yang akan dilakukan.

Pada dasarnya setiap lima tahun sekali Visi Misi Gubernur DIY akan mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan tantangan zaman yang sedang berkembang. Akan tetapi, secara garis besar perubahan yang terjadi tersebut

selalu berangkat dari agenda pembangunan di visi misi sebelumnya yang dirasa masih belum optimal pelaksanaannya serta yang belum tercapai. Seperti di di tahun 2012-2017 konsep yang ditekankan “*Among Tani Dagang Layar*” yang kemudian di tahun 2017-2022 yakni “*Menyongsong Abad Samudera*”. Kedua visi misi tersebut sejatinya dikonsept untuk pembangunan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya wilayah yang berada di Kawasan Pesisir Selatan.

Selanjutnya, dalam periode 2022-2027 yang akan mendatang lebih dikomplekskan lagi dengan paparan visi misi “*Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*”. Kebudayaan ditempatkan sebagai landasan filosofi, modal dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan, serta sebagai sarana diplomasi. Penghayatan dan pemanfaatan serta upaya memaksimalkan pencapaian yang bersumber dari kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu cara yang ditempuh untuk menjalankannya yakni melalui enkulturasi (pembudayaan), yang dimaknai dengan pelaksanaan nilai-nilai serta perilaku yang baik sebagai bentuk kebiasaan hidup, yang mana bukan semata-mata tercipta atas suatu peristiwa khusus.

Akan tetapi, proses pembudayaan tersebut akan berhasil apabila mampu diselaraskan dengan inkulturasi. Dalam hal ini kaitannya dengan penyerapan nilai-nilai serta perilaku luhur dari manusia yang menjalankan suatu budaya. Dengan demikian, diharapkan sumber daya budaya dapat dikelola dengan baik

supaya kemanfaatannya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, upaya pengembangan kawasan pesisir sebagaimana telah digagas dalam prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta guna membangun peradaban baru. Penekanan terhadap pola kehidupan agraris-maritim, dengan cara memaksimalkan pengelolaan sumber daya lokal yang ada.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tentang percepatan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan melalui program-program pembangunan yang secara spesifik menetapkan arah kebijakan pembangunan kalurahan-kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka memangkas birokrasi yang berbelit-belit maka, melalui Peraturan Gubernur tersebut usulan kegiatan dapat secara langsung diajukan oleh Kepala Desa (Lurah) ke Gubernur DIY dengan verifikasi dari Panewu (Camat) dan PMKal (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan). Usulan dari Kalurahan harus sejalan dengan muatan program-program prioritas Pemerintah Daerah DIY yang salah satu diantaranya yakni Program Desa Maritim.

Hadirnya kebijakan pembangunan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada Visi Misi Gubernur yakni, terkait agenda keistimewaan dan pemberian BKK (Bantuan Keuangan Khusus) terhadap kalurahan/desa yang ada di DIY. Penugasan Urusan Keistimewaan mengamanatkan agar dilakukannya percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam rangka keistimewaan. Maka, munculah program-program yang telah dikonsepskan salah satunya terkait 'Budaya Maritim'. Program tersebut

sasaran utamanya adalah kalurahan-kalurahan yang berada di Kawasan Pesisir Selatan. Sebanyak 34 Kalurahan yang telah dibentuk menjadi Desa Maritim dan tersebar di tiga kabupaten yakni Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul. Pembentukan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang berada di kawasan pesisir. Sejalan dengan itu, Kalurahan Tileng di tahun 2021-2022 hingga saat ini telah melaksanakan program Desa Budaya Maritim dengan dukungan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dana Keistimewaan DIY.

Kendati demikian, adapun penelitian terdahulu yang pendekatannya melalui jalur kebudayaan di kawasan pesisir. Hal ini pernah diangkat dalam tulisan yang berjudul “*Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman*”, oleh Suhardi Mukhlis, dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dimana menjelaskan fenomena kemerosotan mentalitas pemerintah dan masyarakat setempat yang tidak menyadari akan potensi kemaritiman yang ada. Sehingga, para peneliti sebelumnya menilai bahwa kedua elemen tersebut pasif dan bermental konsumtif tanpa filtrasi terhadap zaman yang semakin berkembang. Dalam hal ini penekanannya pada dampak negatif yang akan terjadi kedepannya, sehingga memberikan tawaran konsep budaya maritim guna memperkuat masyarakat dan pemerintah Kepulauan Riau. Penekanan kesadaran dan aksi pembangunan kawasan pesisir dalam hal ini dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah bekerjasama untuk merealisasikannya.

Fenomena kemaritiman lainnya juga pernah dikaji oleh Muhammad Novan Prasetya (2018) yang berjudul “Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan *Civil Society*”. Penulis mengangkat sebuah fakta pahit dan menyedihkan yang terjadi di pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil diperebutkan oleh Malaysia. Penekanan terhadap sinergitas antara negara dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat perlu untuk dibangun kembali guna mempertahankan wilayah kemaritiman. Penawaran konsep budaya maritim melalui kebijakan, dalam hal ini ditujukan untuk memperkuat kedua elemen penting yang diibaratkan seperti sebuah tubuh yang membutuhkan rangka dan urat nadi agar mampu berdiri tegak. Dalam membangun suatu kebudayaan masyarakat sipil sebagai tulang punggung, pesisir sebagai urat nadi, dan pemerintahlah yang menegakkan agar menjadi sebuah badan yang utuh.

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Yanti Heriyawati (2020) dalam tulisannya yang berjudul “Kearifan Lokal Hajat Laut Budaya Maritim Pangandaran”, dimana membahas tentang tradisi masyarakat pesisir Pangandaran yang mengalami perubahan struktur sosial. Pangandaran sebagai sebuah kabupaten yang terkenal dengan keindahan objek wisata yang ternyata masih menyimpan ritual ‘Hajat Laut’. Penulis menyampaikan pandangannya terkait tradisi lokal mengalami proses adaptasi menuju perkembangan ekonomi. Dibantu dengan pemikiran Mircea Eliade dalam mencoba menelusuri jejak dari pemikiran-pemikiran lama bermuatan kearifan lokal, serta pemikiran Thomas Kuhn dalam mengupas dinamika paradigma terhadap peristiwa tersebut. Dalam

kajian ini tidak ada diperlihatkan relasi pihak-pihak yang terlibat, hanya sekedar menginformasikan anomali perkembangan hidup masyarakat Pangandaran.

Tidak sampai disitu adapun penelitian lain yang pernah dikaji oleh Anhar Gonggong (2020) atas fenomena yang terjadi di laut Sulu yang terancam akan bahaya keamanan dan keselamatan wilayah maritimnya. Tulisan yang berjudul “Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia dan Strategi Maritim Indonesia” dengan 4 teori utama yakni teori Geoffrey Till, teori Trinitas, teori Efektivitas, teori sinergitas A.F Stones James. Akan tetapi, tulisan ini lebih mengarah pada sisi kinerja dari pemerintah dan relasinya terhadap pihak keamanan di bagian kelautan (Angkatan Laut), tidak ada dijelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dalam permasalahan sebagaimana upaya membangun kembali budaya maritim. Selain itu, aktivitas pemerintah tidak begitu dijelaskan dalam tulisan ini.

Pada tahun 2021, Agus Salim dalam penelitiannya membahas pentingnya pengaruh substansial dari budaya maritim terhadap semangat bela negara dan peningkatan ekonomi serta pengaruhnya terhadap ideologi Pancasila bagi masyarakat di Lampung dalam tulisannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat Terhadap Semangat Bela Negara”. Fenomena yang terjadi di Lampung tersebut kaitannya dengan budaya maritim belum mampu dipahami oleh masyarakat yang berada di hampir sebagian besarnya adalah pesisir laut. Sehingga, penulis memberikan dorongan kepada pemerintah setempat untuk melakukan upaya pembangunan yang dapat bersinergis dan berkesinambungan guna mewujudkan pertahanan NKRI yang

kuat, handal, dan disegani. Akan tetapi, sekalipun menggunakan konsep bela negara penelitian ini secara emosional sosial belum mampu digambarkan. Peran masyarakat seolah hanya menerima tanpa upaya bekerjasama dengan pemerintah.

Jika dikaji memang berbicara tentang budaya maritim dapat dipandang dari berbagai sisi, seperti apa yang pernah dikaji oleh Widiyanto Pudyo (2022) dalam tulisannya yang berjudul “Peran Intelijen Maritim Guna Membangun Budaya Maritim Indonesia sebagai Pilar dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia”. Istilah lain juga kerap dikenal sebagai budaya bahari ini bukan hal yang baru untuk dipahami, karena sudah sejak lama ada dan bahkan menjadi pilar dalam kebijakan yang sudah mendunia. Indonesia sebagai negara kepulauan patut untuk meningkatkan kesadaran akan budaya ini khususnya di beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Sama dengan kajian sebelumnya menggunakan teori yang hampir sama, yang juga melihat bagaimana fungsi dari intelijen maritim. Secara garis besar hanya melihat bagaimana komunitas intelijen bekerja, tidak dengan masyarakat atau warga negara Indonesia itu sendiri.

Dalam kajian Rustam Yusuf (2022) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Botutonuo Melalui Penguatan Budaya Maritim”. Dapat dipahami bahwa berbagai faktor yang memungkinkan mempengaruhi eksistensi dari masyarakat pesisir khususnya nelayan. Dalam upaya peningkatan ekonomi masih belum mampu untuk berinovasi. Mendekati seperti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, bahwa adanya peralihan nelayan ke tani yang

didorong dengan masih rendahnya pendidikan masyarakat setempat. Lantas untuk mewujudkannya masih sangat tergolong sukar, dalam mengubah stigma kebiasaan masyarakat. Solusi yang ditawarkan berupa dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan peran melalui industri maritim yang mungkin saja bisa diterapkan.

Penelitian lain yang dirasa relevan terkait budaya maritim secara teori merujuk pada konsep abstrak yang terdiri atas ekonomi pesisir, kohesi sosial dan tradisi. Selain itu, dilihat dari sisi konsep operasional yang mana meliputi strategi kehidupan, institusi dan IPTEK. Kedua konsep ini diungkap dalam kajian Indira Chairunnisa (2019) dengan judul “Pemahaman Budaya Maritim Masyarakat Pantai Depok Kabupaten Bantul”. Mindset agraris yang telah ada dan mendarah daging dikalangan masyarakat menjadi salah satu faktor melemahnya pemanfaatan potensi kelautan, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah nelayan terhitung sejak tahun 2018 silam. Penekanan akan pentingnya peran dari pemerintah dalam mengembalikan jiwa kemaritiman masyarakat. Kajian yang sejalan dengan apa yang akan diangkat yang mana masih dalam lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya mengeksplorasi pemahaman budaya maritim bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan. Sehingga, dalam penelitian ini sangat jelas menyajikan fenomena kehidupan masyarakat yang berada langsung di pesisir Pantai Depok.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sekalipun sama-sama mengangkat tentang budaya maritim. Perbedaan terletak pada pokok pembahasan dan konsep yang digunakan dalam memahami dan

menganalisis relasi kuasa tentang kontradiksi program Desa Maritim. Penetapan Kalurahan Tileng sebagai Desa Budaya Maritim merupakan sebuah upaya mempercepat pembangunan sekaligus bentuk respon Pemerintah Kalurahan terhadap arah kebijakan strategis Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Tileng mendapat predikat sebagai Desa Maritim dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebesar 500 juta (2021) dan 750 juta (2022), besaran dana tersebut direalisasikan dengan membangun gedung Sekolah Alam Pesisir, Rumah Olahan, Kios Maritim, serta beberapa bangunan fisik lainnya, dan pelatihan-pelatihan pengelolaan ikan. Pada proses berjalannya program, Pemerintah Kalurahan Tileng membiasakan sebutan ‘Desa Budaya Maritim’ agar mampu dijiwai dan secara bertahap dapat diterima oleh masyarakat lokal.

Disisi lain, dalam RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) sebagaimana merupakan dokumen pembangunan yang muatannya bersumber dari aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Kalurahan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Program Desa Maritim yang merupakan bentuk program titipan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diklaim dengan usulan langsung dari Pemerintah Kalurahan Tileng. Secara spesifik dalam RPJMKal program Desa Maritim ini belum dicantumkan. Pada RPJMKal terdapat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, akan tetapi yang dianggarkan cenderung pada belanja-belanja administrasi, konsumsi, dan perlengkapan lainnya yang menyimpang dari makna bidang

yang telah ditetapkan. Berdasarkan pencermatan RPJMkal serta didukung penjelasan dari pihak pemerintah kalurahan bahwasannya, besaran anggaran belanja yang terealisasi cenderung pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dialokasikan untuk Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kendati demikian, upaya pembangunan melalui penerapan program Desa Maritim tidak selaras dengan aspirasi masyarakat yang dimuat dalam RPJMkal.

Program Desa Maritim dalam perjalannya memicu pro dan kontra dalam kehidupan sosial masyarakat kalurahan terhadap Pemerintah Kalurahan Tileng. Disisi lain, masyarakat di Kalurahan Tineng notabene bermata pencaharian sebagai petani tadah hujan yang menggantungkan kehidupannya pada sektor agraris. Secara geografis Kalurahan Tileng memiliki potensi wilayah kelautan berupa tebing yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Akan tetapi, potensi sumber daya manusia yang masih rendah serta faktor lain seperti ketersediaan air bersih belum mampu mendukung program tersebut. Namun, Pemerintah Kalurahan Tileng memilih Program Desa Maritim yang penerapannya sudah dimulai sejak tahun 2021 hingga saat ini.

Kendati demikian, peneliti tertarik untuk mengambil posisi baru dalam mengkaji fenomena penerapan Program Desa Maritim di Kalurahan Tileng dengan judul penelitian “Analisis Kritis Relasi Kuasa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Studi Kontradiksi Program Desa Maritim Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah terletak pada praktik-praktik pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam penerapan Program Desa Maritim.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Mengapa Pemerintah Kalurahan Tileng mendorong penerapan program “Desa Maritim” dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas hidup sebagai petani?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membongkar rasionalitas Pemerintah Kalurahan Tileng mendorong penerapan program “Desa Maritim” dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas hidup sebagai petani.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini untuk memberikan evaluasi atau catatan kritis atas program pembangunan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kalurahan/desa, dan kepada Pemerintah Kalurahan yang seyogyanya dapat menyesuaikan program yang akan diterapkan dengan kondisi dan lokus kehidupan masyarakat setempat, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pembangunan

sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan pembangunan khazanah Ilmu Pemerintahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pembangunan baik itu Supra Desa, Pemerintah Desa maupun masyarakat sehingga, terciptanya keselarasan antara elemen-elemen tersebut. Selain itu, dapat memberikan kemanfaatan bagi desa-desa yang ada di Indonesia dalam mendudukkan Desa sebagai wadah besar pembangunan yang memiliki keselarasan kuasa antara pemerintah dan elemen masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

1. Relasi Kuasa

Relasi menurut Drs. Abdul Chaer (2008;48) adalah hubungan kemaknaan, antara organisasi dengan komunitas terdapat hubungan saling ketergantungan sehingga memotivasi organisasi tersebut untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Sejalan dengan apa yang disampaikan tersebut, George Hillery (2002;67) juga menyatakan bahwa Relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu yang memiliki hubungan interaksi satu sama lain. Selain itu, disampaikan juga oleh Jayakusuma (2001;25) bahwa Relasi atau yang sering disebut hubungan yang adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat atau dampak terhadap yang lain. Pernyataan ketiga tokoh diatas dapat

disimpulkan bahwa relasi merupakan suatu hubungan interaksi yang terjadi antara dua objek atau lebih, baik itu manusia yang tergabung dalam kelompok, organisasi, himpunan dan sebagainya yang saling terhubung dan memiliki pengaruh dan memberikan dampak antara satu dengan yang lain.

Pengaruh yang terjalin dalam sebuah hubungan interaksi atau relasi secara sederhana dapat dipahami sebagai kuasa. Ketika seseorang mampu mempengaruhi suatu hubungan interaksi dengan objek maka, orang tersebut baik secara langsung atau tidak langsung telah memperoleh kuasa untuk menguasai. Dalam memahami sebuah kekuasaan seperti halnya pada pemikiran Karl Marx meninjau kekuasaan negara, dimana Marx memandang bahwa negara pada dasarnya merupakan alat kekuasaan bagi sekumpulan manusia di dalam kehidupan masyarakat yang hadir untuk menindas golongan lain dalam upaya mencapai tujuan. Akan tetapi, pemikiran semacam ini cukup resisten untuk meninjau relasi kuasa pada tataran akar rumput.

Pemikiran lain yang mendekati teori Marx dalam memahami relasi kuasa ialah pemikiran Michel Foucault, dimana merupakan seorang filsuf yang terkenal sebagai pelopor strukturalisme. Pemikiran beliau menyatakan bahwa kekuasaan adalah dimensi dari relasi. Istilah yang sederhana dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault pada umumnya berbeda dengan pantangan para ahli dan masyarakat awam yang memandang suatu kekuasaan. Kekuasaan yang

eksis dipahami dan kerap dibicarakan sebatas sumber daya ataupun pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk menjalankan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam hal ini tentu saja kekuasaan diartikan secara represif atau mungkin sering kali opresif. Seperti halnya yang banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial lainnya.

Kekuasaan yang dicetuskan oleh Michel Foucault mengarah pada pemahaman yang sangat orisinal. Bagi Foucault kekuasaan tidak hanya sekedar dimiliki atau dipraktikkan dalam suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat banyak, sehingga posisi tersebut dianggap strategis untuk mempengaruhi satu sama lain. Penekanan bahwa kekuasaan lebih dominan pada individu dan subjek dalam lingkup kehidupan yang paling kecil. Sebab, pada dasarnya kekuasaan akan menyebar bahkan tanpa dialokasikan, sehingga meresap ke dalam setiap jalinan atau hubungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat modern, kekuasaan berlangsung hampir di semua tempat. Interaksi kekuasaan menciptakan hubungan yang saling ketergantungan antara berbagai pihak, baik pihak yang memegang kekuasaan maupun objek yang menjadi sasaran kekuasaan. Bahkan dalam fenomena kemiskinan dan keterbelakangan sekalipun dapat melahirkan kekuasaan yang identik dengan keuntungan sepihak, baik untuk diri sendiri maupun untuk sekelompok orang.

Oleh sebab itu, Foucault istilah kuasa (power) disini menunjuk pada totalitas struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan dari individu-

individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Foucault lalu membedakan relasi kuasa menjadi tiga bagian, diantaranya:

- a. Relasi kuasa sebagai “permainan strategis” (*strategy games between*) antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (*power*) di level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemerdekaan. Sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni sebagai permainan strategi. Dalam konsep ini, kuasa menentukan relasi antara mitra dalam suatu ensemble tindakan-tindakan.
- b. Relasi kuasa sebagai “dominasi” (*domination*). Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi dimana ranah pilihan tindakan subyek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris dimana di dalamnya orang-orang yang ter subordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbatas oleh karena efek dari kuasa.
- c. Relasi sebagai bentuk pemerintahan (*Government*). Konsepsi pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang memimpin, dalam arti mengarahkan atau mengontrol tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atau pihak lain. Mulai dari pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara nyata ataupun yang terwujud dalam hubungan timbal-balik yang terjadi.

Kendati demikian, berangkat pemaparan beberapa konsep tentang relasi kuasa tersebut peneliti menggunakan konsep Michel Foucault untuk mengkaji relasi kuasa secara mikro lokal antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penerapan program Desa Maritim di Kalurahan Tileng. Apakah relasi kuasa yang tercipta antara pemerintah desa dan masyarakat yang mayoritas petani, melalui penerapan program desa maritim sebagai sebuah strategi, dominasi ataupun taktik dalam menjalankan pemerintahan guna mengarahkan upaya pembangunan desa.

2. Governmentality

Menurut (Nikolas Rose, 2006) *Governmentality* pada dasarnya sesuatu yang berjalan karena penggunaan kekuatan yang melibatkan diri sendiri (*self-governing*) oleh individu. Artinya, individu dalam hal ini secara aktif terlibat dalam suatu proses pengaturan diri mereka sendiri sebagaimana telah diatur dalam norma-norma dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. *Governmentality* mengandung makna yang mengarah pada kehendak, mentalitas (moda berpikir) dan rasionalitas memerintah yang bertujuan untuk memperbaiki seperti yang disampaikan oleh Sutoro Eko dalam dialog youtube-nya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pemerintahan adalah perintah dengan tujuan tertentu, yang berarti untuk suatu tujuan dan praktik-praktik tertentu yang telah ditetapkan. Pemerintahan adalah seni. Adanya upaya mengarahkan perilaku dengan moda penalaran yang telah diperhitungkan.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada mulanya konsep *governmentality* dikembangkan oleh seorang filsuf yang juga merupakan sejarawan asal Prancis bernama Michel Foucault (1926-1984) dalam karyanya yang berjudul “Kelahiran Biopolitik: Kuliah Michel Foucault di *College de France* tentang *Governmentality Neo-Liberal*). Konsep *governmentality* yang dicetuskan oleh Foucault digunakan untuk memberikan penjelasan serta pemahaman terkait cara negara dan institusi kekuasaan modern dalam mempengaruhi dan mengatur perilaku suatu individu atau masyarakat di masa sekarang ini. Secara sederhana *governmentality* dipahami sebagai sebuah kerangka konseptual yang bermanfaat untuk menganalisis bagaimana kemudian pemerintah mengoperasikan kekuasaannya dalam masyarakat modern. Pada akhirnya, banyak ilmuwan yang turut mengembangkan pemikiran Foucault seperti Thomas Lemke, Nikolas Rose dan Wendy Larner.

Kendati demikian, Foucault menggunakan istilah ‘*governmentality*’ dalam hal ini untuk secara tegas mendeskripsikan bagaimana rasionalitas praktik-praktik serta tata cara pemerintahan itu diarahkan untuk mempengaruhi ataupun mengatur perilaku masyarakat secara efektif. Dalam konsep *governmentality* tersebut melibatkan elaborasi seperti kekuasaan politik, pengetahuan, institusi dan juga teknik-teknik yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan upaya mempengaruhi dan mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, *governmentality* menjadi konsep penting dalam mengkaji dan mengkritisi suatu fenomena

kekuasaan dan pemerintahan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana kemudian kekuasaan tersebut dijalankan dalam masyarakat modern yang persoalannya begitu kompleks.

Sejalan dengan itu, dalam konsep *governmentality* menjadi dasar untuk mengkritik bagaimana kekuasaan yang dioperasikan oleh pemerintah desa melalui pembangunan desa. Karya Tania Murray Li yang berjudul “The Will To Improve (Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan Di Indonesia)” yang diterjemahkan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi pada tahun 2012, sangat menggambarkan *governmentality* dijadikan sebagai kritik terhadap praktik-praktik politik dalam konteks pembangunan dan pertanian yang terjadi di wilayah pedesaan di Indonesia. Pemikiran Tania Li yang dituangkan dalam bukunya tersebut mengandung analisis yang mendalam tentang perencanaan pembangunan dan kekuasaan di Indonesia, dengan mengeksplorasi hubungan antara pembangunan dan praktik-praktik kekuasaan, serta bagaimana program pembangunan itu diterapkan.

Sorotan utama pada kajian Tania Li dalam tulisannya ialah hubungan interaksi yang tercipta antara pemerintah, pemegang kepentingan lokal, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan. Tania Li dalam tulisannya tersebut berhasil mengungkapkan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan, alokasi sumber daya, dan distribusi manfaat dari suatu pembangunan dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik. Kajian yang dilakukan tersebut

berlangsung dengan mengambil 3 studi kasus yang berlokasi di Kalimantan Tengah, Maluku, dan Jawa Barat. Terdapat ketegangan dan konflik dalam penerapan program pembangunan di tiga tempat tersebut. Hal ini kemudian yang mendorong Tania Li untuk mengamati program pembangunan yang dijalankan pada kenyataannya memiliki perbedaan kepentingan, persepsi, dan penafsiran terhadap program pembangunan yang berujung pada ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dan realitas yang terjadi dilapangan.

Penekanan kritik terhadap program pembangunan yang diterapkan di wilayah pedesaan sering kali tidak menjadikan kepentingan masyarakat lokal sebagai landasan utama dari upaya pembangunan. Oleh karena itu, Tania Li menjelaskan bahwa konsep *governmentality* dalam hal ini yaitu, cara institusi pemerintahan untuk mengatur serta mempengaruhi masyarakat ditempuh dengan praktik-praktik administratif, kebijakan, dan juga intelektual atau pengetahuan. Dinamika kekuasaan yang terjalin dengan cara yang kurang tepat melalui praktik program pembangunan menciptakan perubahan sosial dan ketimpangan yang mempengaruhi masyarakat khususnya para petani. Kendati demikian mengundang munculnya reaksi perlawanan masyarakat lokal dalam merespon praktik-praktik pembangunan yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan mendasar mereka.

Oleh karena itu, melalui pintu masuk *governmentality* peneliti melakukan analisis dan menyajikan gambaran yang kritis terhadap

praktik-praktik politik dan kekuasaan dalam konteks penerapan program pembangunan Desa Maritim di Kalurahan Tileng.

3. Desa Maritim

Desa Maritim merupakan desa-desa yang berada di wilayah pesisir atau daerah pantai yang mana berbatasan langsung dengan laut (BPS, 2015). Pada dasarnya konsep Desa Maritim tidak terlepas dari konsep dasar tentang Desa secara umum sebagaimana dipahami sebagai sebuah aglomerasi permukiman. Desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang ditempati dan dihuni oleh sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum serta memiliki pemerintahan tersendiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun/padukuhan (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampong, di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut Kalurahan. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintahan terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat.

Berangkat dari itu, pengembangan Desa Maritim tidak terlepas dari konsep pembangunan kawasan pesisir. Seperti yang diketahui bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dimana dipengaruhi oleh perubahan di darat dan juga di laut. Oleh karena itu, secara sederhana Desa Maritim dapat dipahami sebagai desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Pemahaman tersebut berdasarkan pada pemaparan makna Desa Maritim yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam dokumen Kajian Sosial tahun 2015. Maka dari itu, konsep Desa Maritim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Karakteristik Geografi dan Kriteria Desa Maritim

Secara eksplisit ditegaskan bahwa Desa Maritim merupakan desa yang lokasinya berada di wilayah pesisir ataupun daerah pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah pesisir yang dimaksud memiliki karakteristik umum terkait geografisnya. Merujuk pada kajian yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, maka menetapkan karakteristik geografis Desa Maritim antara lain: *Pertama*, menjadi wilayah bertemunya berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga wilayah pesisir yang dimaksud merupakan hasil keseimbangan yang secara dinamis dari proses

pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas. *Kedua*, wilayah yang berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran dan mencari makan. *Ketiga*, wilayah yang memiliki pantai yang sempit akan tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut. Keempat, wilayah yang dapat dijadikan sebagai tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik secara sektoral maupun regional dan mempunyai dimensi internasional.

Selain karakteristik geografis, dalam konsep Desa Maritim adanya penegasan kriteria yang diantaranya berada di wilayah pesisir DIY, memiliki potensi usaha kelautan dan perikanan, adanya potensi wisata bahari, serta terdapat potensi pertanian lahan pasir pantai. Tidak hanya itu keberadaan masyarakat penggerak sumber daya manusia yang berkarya pada usaha kelautan dan perikanan seperti komunitas bahari atau ekowisata. Artinya, desa yang memiliki potensi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang juga tergabung dalam kelompok petambak, usaha garam, pengelola wisata, pembudidaya ikan. Selanjutnya, desa tersebut didukung dengan ketersediaan fasilitas dasar yang mengarah pada usaha perikanan yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam satu

sistem bisnis perikanan. Ketentuan tersebut dimuat dalam kajian oleh dinas terkait guna mempertegas kriteria dasar tentang Desa Maritim.

Desa Maritim juga ditekankan memiliki potensi bahari, yakni sebagai kegiatan wisata alam yang berlangsung di pesisir laut yang meliputi pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut. Dengan demikian, diharapkan kawasan pesisir DIY memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimasukkan sebagai Desa Maritim dari sisi potensi Bahari. Selain itu, pada wilayah pesisir DIY sendiri juga memiliki potensi lahan pasir pantai untuk kegiatan pertanian juga peternakan. Oleh karena itu, pesisir pantai yang dipandang memiliki potensi kaya akan sumber daya alam dan jasa lingkungan, perlu untuk dioptimalisasikan pemanfaatannya dengan baik dan benar sehingga pengelolaannya tidak hanya dalam upaya menangani bencana namun juga berfungsi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha budidaya tanaman yang sesuai serta bernilai ekonomis.

Upaya elaborasi maritim-agraris dalam pengembangan usaha tani lahan pantai Desa Maritim lebih mengedepankan konsep usaha tani konservasi. Pengembangan ini kaitannya dengan metode penanaman tanaman penahan angin, budidaya tanaman semusim seperti bawang merah, vabe merah dan ubi jalar, dengan diikuti kegiatan perbaikan tanah berupa pembuatan pupuk kandang dan

pengadaan sumur renteng, serta upaya-upaya lain yang menunjang produktivitas dari pertanian lahan pasir.

b. Maksud dan Tujuan Pengembangan Desa Maritim

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya pengembangan Desa Maritim sebagai bingkai dari upaya pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY khususnya yang berada di wilayah pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan serta potensi yang ada di desa maritim itu sendiri. Desa Maritim yang ada di DIY pada dasarnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokalnya, serta dalam hal ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan dalam upaya peningkatan nilai tambah ekonomi tersebut.

Secara lebih rinci adapun yang menjadi tujuan pengembangan Desa Maritim di DIY adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berada di wilayah pesisir melalui upaya pengembangan potensi perikanan dan kelautan, potensi budaya, serta potensi pertanian berupa tanaman pangan, dan peternakan di lahan pantai.
- 2) Memperluas peluang akan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk.

- 3) Memperkuat potensi desa di wilayah pesisir yang dapat menjadi benteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global.
- 4) Memperkuat dan mempererat sistem kelembagaan desa di wilayah pesisir untuk mengurangi angka kemiskinan melalui usaha-usaha yang berbasis kelautan, pariwisata dan ketahanan pangan.
- 5) Memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi-organisasi tingkat desa yang berada di wilayah pesisir yang dilihat dari sisi intelektual maupun keterampilan dalam pengelolaan desa.
- 6) Memperkuat tatanan nilai dan kehidupan masyarakat desa yang berada di wilayah pesisir dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketentraman.

Pembangunan Desa Maritim pada dasarnya dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan prinsip yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan DIY. Dengan demikian, dalam hal ini inisiatif dari pemerintah daerah DIY mencetuskan program ini sebagai *pilot project* pembangunan Desa yang berada di wilayah pesisir DIY yang pada pelaksanaannya dilakukan secara lintas OPD. Artinya, terkait program Desa Maritim yang menjadi *leading sector*-nya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

c. Model Pengembangan Desa Maritim

Pengembangan Desa Maritim ala DIY dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan

masyarakat yang tidak hanya berbicara tentang pengembangan potensi ekonomi masyarakat saja, namun juga dalam hal ini harus mampu meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta tercapainya pemeliharaan tatanan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Maritim setidaknya mengandung makna perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan dalam setiap diri individu sebagai masyarakat pada multi aspek. Aspek yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu: ekonomi, kesejahteraan sosial, budaya, spiritual, dan pengembangan karakter/sikap hidup.

Program Desa Maritim dalam mencapai pemberdayaan masyarakat dituntut untuk mampu menjalankan strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui :

- 1) Pendidikan dan pelatihan;
- 2) Penyuluhan dan pendampingan;
- 3) Kemitraan usaha;
- 4) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- 5) Kemudahan akses permodalan;
- 6) Perluasan akses pemasaran; dan
- 7) Penguatan kelembagaan.

Kendati demikian, konsep Desa Maritim yang merupakan kajian dari OPD yang mendampingi pelaksanaan program Desa

Maritim di Kalurahan Tileng. Selanjutnya konsep ini kan menjadi dasar analisis berdasarkan hasil temuan di lapangan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif Grounded Teori melalui pendekatan kritis. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk lebih dalam mengidentifikasi fakta lapangan dengan cara mengamati dan mendalami secara langsung kontradiksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kalurahan Tileng dalam penerapan program Desa Maritim. Melalui pendekatan kritis peneliti mampu menganalisis dengan melibatkan pemahaman dan evaluasi terhadap fenomena kontradiksi yang diteliti. Peneliti berusaha untuk mengeksplorasi apa yang menjadi penyebab ketimpangan secara mikro lokal kaitannya dengan relasi kuasa antara pemerintah desa dengan masyarakat di Kalurahan Tileng melalui penerapan program Desa Maritim yang merupakan program titipan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Awalnya peneliti selama 40 hari dalam waktu yang bersamaan melaksanakan kegiatan KKN Reguler 55 dan saat itu juga sudah melihat dan melirik persoalan yang terjadi di Kalurahan Tileng. Pada saat KKN peneliti sempat menjadikan Desa Maritim sebagai salah satu tema dalam program kerja. Berangkat dari pelatihan maritim, peneliti menemukan permasalahan yang kemudian diangkat tema penelitian saat membaca tulisan masyarakat yang

merupakan *feedback* dari kegiatan yang dilaksanakan pada Agustus 2022. Setelah itu, disisa waktu yang ada saat KKN peneliti menggali data-data yang dapat mengarahkan alur dari permasalahan yang ada di lokasi KKN yang sekaligus menjadi lokasi penelitian ini dilakukan.

Selama KKN dan dilanjutkan dengan penelitian yang sesungguhnya di awal bulan Januari-Maret 2023 peneliti melakukan observasi partisipatif, hal ini berlangsung dengan cara membangun interaksi sebanyak-banyaknya dengan Pemerintah Kalurahan Tileng, dan masyarakat setempat, BPKal, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu kelompok olahan. Tidak hanya sampai di situ, peneliti juga mengobservasi secara langsung pembangunan-pembangunan yang diselenggarakan melalui program Desa Maritim yang pelaksanaannya masuk dalam postur BKK Dana Keistimewaan DIY.

Selama melakukan kegiatan KKN dan juga penelitian, hal yang peneliti temukan dalam Pemerintahan Kalurahan Tileng adalah adanya ketidak satu pemahaman tujuan antara Lurah dan Pamong Kalurahan. Pada dasarnya Lurah yang menjabat sangat antusias dan terlihat selalu berupaya untuk memajukan Kalurahan Tileng dengan terobosan-terobosan baru yang sebelumnya diakui oleh masyarakat belum mampu dilaksanakan oleh lurah-lurah sebelumnya. Akan tetapi, bersamaan dengan itu tidak sedikit pamong atau aparat desa yang masih berada di zona nyaman sehingga belum sepenuh hati untuk menjalankan tugas sebagai pamong kalurahan. Akan tetapi, secara umum diakui pelayanan yang diberikan oleh segenap pemerintah Kalurahan Tileng terhadap masyarakat

maupun penerimaan dan keterbukaan terhadap mahasiswa sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas berdesa sangatlah baik.

Di kalangan masyarakat, peneliti mengamati bahwa terdapat relasi sosial yang sangat tinggi tercipta tanpa harus ada kesepakatan yang dibuat. Dengan kultur sosial yang sangat melekat seperti semangat gotong-royong yang sangat besar. Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa masyarakat pada umumnya juga masih sangat minim dalam partisipasi kaitanya dalam membangun sebuah relasi dengan pemerintah desa. Masyarakat cenderung tertutup dan cenderung banyak menilai kinerja pemerintah desa tanpa partisipasi yang aktif termasuk dalam pembangunan desa, misalnya untuk menghadiri pertemuan atau kegiatan yang dilaksanakan di desa. Hal ini sangat terasa ketika pelaksanaan KKN ada beberapa program pemberdayaan bagi masyarakat, yang ditempuh dengan membangun kerja sama antara mahasiswa dan pemerintah desa dalam menggiatkan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut, akan tetapi yang hadir hanya satu atau dua orang saja.

Meskipun demikian, penelitian yang berlangsung di Kalurahan Tileng berjalan dengan lancar. Hal ini didukung dengan keterbukaan Pemerintah Kalurahan Tileng dan masyarakat dalam merespon kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada perjalanan penelitian, peneliti tidak hanya meneliti di Kalurahan Tileng, akan tetapi juga melakukan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempertajam penelitian dalam membongkar akar dari kontradiksi penerapan program Desa Maritim di Kalurahan Tileng.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan. Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke dalam lingkungan pemerintahan dan masyarakat melalui dinamika KKN ditambah dengan penelitian lapangan lanjutan setelah selesai masa KKN. Kemudian, memperhatikan secara langsung dengan berinteraksi dan terlibat dalam kehidupan masyarakat Kalurahan Tileng. Sehingga, peneliti dapat memahami dan mendalami terkait konteks sosial serta dinamika yang terjadi dalam proses penerapan program Desa Maritim.

Kedua, Wawancara mendalam. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan. Kata-kata, ide, ataupun komentar dalam proses wawancara menjadi data primer bagi peneliti tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tileng serta OPD terkait dalam menjelaskan makna-makna subjektif atas fenomena atau fakta lapangan yang mereka alami. Wawancara yang peneliti lakukan tidak terlepas dari panduan wawancara namun, berlangsung secara mengalir dalam memantik keterbukaan informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka akan fenomena yang diteliti secara mendalam.

Tabel I. 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Arif Budiharja Purnomo Putra	Analisis DKP
2	Suwardi, S. Pd	Lurah Tileng
3	Edi Saraya, S. Pd	Pamong (Carik)
4	Wijiati, S. A.P	Pamong (Ulu-ulu)
5	Bondhan Gendoyono, S. T	Pamong (Tata Laksono)
6	Sujarwo	Dukuh Teken
7	Rubyo	Dukuh Banagung
8	Karsimin	Dukuh Ngerombo
9	Wagita, S.Pt	BPKal
10	Jumiran	Tokoh Masyarakat
11	Supriadi	Tokoh Masyarakat
12	Sularno	Tokoh Masyarakat
13	Yuniati	Ketua Kelompok Olahan Nanas
14	Worosastini	Ketua Kelompok Olahan Mandesan

Sumber: Data Primer 2023

Ketiga, Dokumentasi. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder dari hasil penelitian yang dilakukan di Kalurahan Tileng berupa RPJMKal, Proposal Desa Maritim, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, dokumen kajian Desa Maritim yang didapatkan dari penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dengan demikian, dokumen yang ada tersebut menjadi data penting dalam menganalisis konteks permasalahan yang sedang diteliti.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Grounded Teori dengan pendekatan kritis. Analisis data dilakukan dengan cara-cara pelacakan yang sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan data-data lainnya yang telah dikumpulkan selama melakukan penelitian. Pada tahap ini melalui pendekatan kritis, dalam analisis data grounded teori peneliti akan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi permasalahan penelitian. Berikut ini adapun menurut Emzir (2011:210) menjelaskan bahwa dalam proses analisis data yang menggunakan penelitian kualitatif Grounded Teori bersifat sistematis dan mengikuti beberapa format standar yang meliputi:

- a. Pengkodean Terbuka (*open coding*), pada bagian ini peneliti mulai secara rinci menganalisa dengan membaca, mengamati dan memecahkan data menjadi bagian-bagian analisis yang lebih kecil. Peneliti memberikan kode pada data yang mencerminkan apa yang menjadi makna atau ide yang terkandung dari data yang diperoleh, sehingga membantu peneliti untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang bersumber dari data yang ada.
- b. Pengkodean Selektif (*selective coding*), setelah melewati tahap pengkodean yang pertama, maka peneliti kemudian akan memfokuskan pikiran pada konsep-konsep yang dirasa paling relevan dengan data

yang ada. Selanjutnya, peneliti mengembangkan konsep-konsep tersebut dan mulai dikaitkan satu dengan yang lain dalam bingkai kategori yang besar. Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah untuk mempersempit fokus analisis sehingga mampu membangun kerangka teori yang lebih kokoh.

- c. Pengembangan Teori, setelah melewati tahap kedua, peneliti mulai mengembangkan teori yang mulanya berakar dari data yang ada. Dalam hal ini teori dikembangkan berangkat dari pola umum atau hubungan konsep yang muncul dari data, yang kemudian menjadi dasar teori yang digunakan. Pada bagian ini proses yang terjadi akan melibatkan refleksi, abstraksi dan juga penemuan yang berkelanjutan.
- d. Pengujian Teori, pada bagian ini, dalam rangka memverifikasi dan memperluas teori yang sedang dikaji maka, peneliti akan mengumpulkan lalu menganalisis wawancara lanjutan, observasi, ataupun sumber data lain yang mendukung. Oleh karena itu, ketika peneliti menemukan data baru, tahap ini akan membantu dalam memperkuat dan menguji teori yang muncul dari analisis data yang sebelumnya.
- e. Integrasi Teori, tahap ini menjadi bagian terakhir. Peneliti akan melakukan pengintegrasian temuan dan juga konsep yang telah dikembangkan ke dalam kerangka teoritis yang lebih besar. Kendati demikian, teori tersebut nantinya akan memperlihatkan hubungan antara

konsep-konsep yang dimana ada dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

3. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini, secara garis besar data disajikan dengan narasi dan juga cerita yang berangkat dari pendekatan kritis yang dilakukan oleh peneliti. Narasi dalam hal ini menjadi cara bagi peneliti untuk menyampaikan peristiwa dan pengalaman yang mencerminkan dimensi kritis atas fenomena yang diteliti yakni penerapan program Desa Maritim di Kalurahan Tileng. Selain itu, peneliti juga menyajikan data temuan dalam bentuk tabel, dan gambar yang telah peneliti susun berdasarkan hasil temuan di lapangan maupun dari pendalaman dan pencermatan berbagai literatur yang peneliti gunakan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN TILENG

A. Sejarah Kalurahan

Pada tahun 1921 menjadi awal sejarah lahirnya Desa atau yang sekarang disebut sebagai Kalurahan Tileng. Nama dari kalurahan ini berasal dari sebuah tanaman pohon yang dikenal dengan ‘Pohon Tileng’ yang letaknya berada di Padukuhan Pugeran pada saat itu. Selain itu, dimana pada saat itu terjadinya perang besar antara Prabu Brawijaya V di Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah dari Kerajaan Demak. Diceritakan karena saat sebelum tahun 1921 di wilayah Tileng banyak terjadi kekacauan dan kejadian-kejadian yang membuat resah warga, sehingga dari Keraton Ngayogyakarta memerintahkan bapak Karyo Suparto dan Nama Suparto pemberian dari Panjenenganipun sinuwun Hamengku Buwono Inggang Kaping VIII dan diberi kuasa untuk memimpin menentramkan Tileng.

Setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah membuat aturan yang berisikan perintah agar pemimpin desa harus mampu membaca dan menulis, atas dasar tersebut maka masa kepemimpinan dari Ki Lurah Kariyo Suparto digantikan oleh Bapak Sugeng. Dalam perjalanan kepemimpinan Bapak Sugeng terjadilah pemekaran Padukuhan yakni sebagai berikut:

1. Padukuhan Padukuhan Manggung
2. Padukuhan Ngalangombo
3. Padukuhan Teken
4. Padukuhan Tileng

5. Padukuhan Mloko
6. Padukuhan Sentul
7. Padukuhan Ngasem
8. Padukuhan Nanas
9. Padukuhan Mandesan
10. Padukuhan Pugeran
11. Padukuhan Papringan
12. Padukuhan Ngrombo
13. Padukuhan Sawah
14. Padukuhan Banagung
15. Padukuhan Ploso
16. Padukuhan Ngringin

Perlu diketahui bahwa Kalurahan Tileng satu-satunya Kalurahan yang memiliki wilayah administrasi paling luas dibandingkan dengan kalurahan-kalurahan lainnya yang ada di Kapanewon Girisubo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlepas dari itu, Kalurahan Tileng juga memiliki sejarah kepemimpinan yang terus bergulir sejak tahun 1921 hingga saat ini. Ada pun pergantian kepemimpinan yang terjadi sebagai berikut:

1. Bp. Kariyo Suparto
Periode Tahun 1921 – 1936
2. Bp. Sugeng
Periode Tahun 1936 -

3. Bp. Sukino
Periode Tahun 22 Agustus 1988 – 25 Desember 1991
4. Bp. Citro
Periode Tahun 25 Desember 1991 – 21 April 1994
5. Bp. Sastro Sarjono
Periode Tahun 21 April 1994 – 18 Maret 2000
6. Bp. Pawiro dikromo
Periode Tahun 18 Maret 2000 – 16 Juli 2002
7. Bp. Sastro Sukarno
Periode Tahun 16 Juli 2002 – 27 November 1990
8. Bp. Wahabi
Periode Tahun 27 November 1990 – 27 November 1997
9. Bp. Parman Purwo Atmojo
Periode Tahun 27 November 1997 – 27 November 2007
10. Bp. Drs. Supriyadi
Periode Tahun 27 November 2007 – 27 November 2019
11. Bp. Karyanto, S.IP (Pj. Kades)
Periode Tahun 27 November 2019 – 31 Desember 2019
12. Bp. Suwardi, S.Pd
Periode Tahun 31 Desember 2019 – sekarang

Perguliran masa kepemimpinan dari tahun 1921 hingga saat ini sudah terjadi sebanyak 12 kali pergantian, satu diantaranya mengalami masa jabatan tersingkat pada tahun 2019 dimana Bapak Karyanto, S.IP sebagai Penanggung

Jawab sementara sebelum akhirnya digantikan oleh lurah yang saat ini yang adalah Bapak Suwardi, S.Pd. Diakui oleh banyak pihak termasuk masyarakat Tileng sendiri bahwa dari banyaknya pemimpin yang pernah menjabat sebagai lurah masa yang saat ini jauh lebih maju, banyak pembangunan yang mulai digagas oleh Lurah Suwardi, S.Pd. Beliau seorang yang bertahun-tahun sebagai seorang tenaga didik di bidang pendidikan sebelum akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Lurah di Kalurahan Tileng.

B. Geografis

Kalurahan Tileng merupakan salah satu kalurahan dengan wilayah administrasi terluas yang ada di Kapanewon Girisubo, Gunungkidul, DIY dengan luas wilayah 17.712 Ha. Secara geografis wilayahnya sebagian besar berada di pinggiran selatan Kabupaten Gunungkidul. Terdiri dari tiga kondisi wilayah yakni pemukiman, telaga sawah tadah hujan, dan sapadan lautan atau kawasan pesisir. Kalurahan Tileng terletak antara 110.74905 BT/-8.172675 LS, dengan tipologi daerah pesisir/nelayan dan berklasifikasi sebagai kalurahan Swasembada kategori mula. Lebih detailnya kalurahan ini berada pada ketinggian 300 Mdpl, dengan topografi dataran tinggi serta memiliki curah hujan 2000 mm dengan suhu udara rata-rata 79 derajat Celcius.

Jika dilihat dari orbitalnya, Kalurahan Tileng memiliki jarak dari Kapanewon sejauh 2,5 Km. Selanjutnya jarak dari Pusat Pemerintahan Kota/Ibu Kota Kabupaten sejauh 40 Km. Sedangkan, jarak dari Ibu Kota Provinsi yakni 80 Km. Secara administrasi Kalurahan Tileng memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

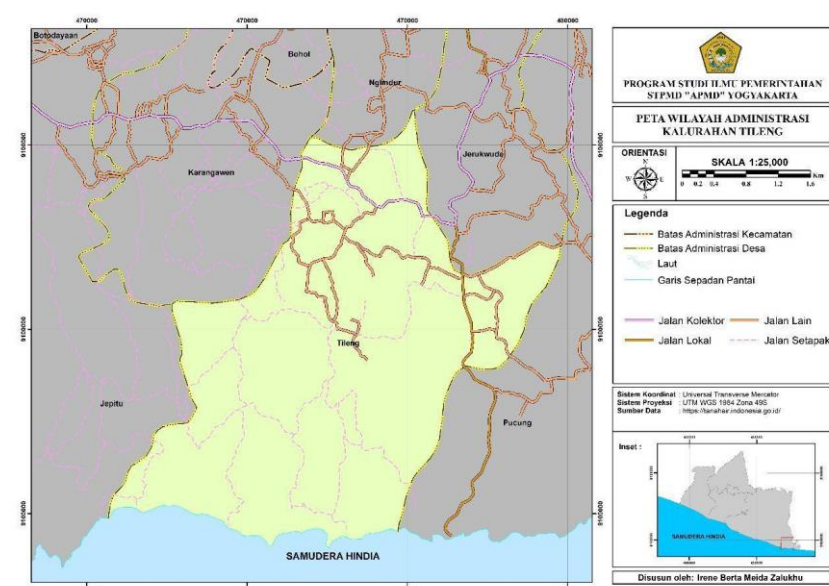
Sebelah Utara : Kalurahan Nglindur

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat : Kalurahan Karangawen dan Jepitu

Sebelah Timur : Kalurahan Jerukwudel dan Pucung

Gambar II. 1 Peta Wilayah Administrasi Kalurahan Tileng



Sumber: Indonesia geospasial

Kalurahan Tileng memiliki pemetaan wilayah administrasi yang sangat luas karena di dalamnya terdapat 16 Padukuhan, 49 Rukun Tetangga (RT), 16 Rukun Warga (RW), yang mana tersebar di setiap wilayah Kalurahan Tileng. Selain itu, memiliki lautan lepas yang dikenal dengan Samudera Hindia atau kerap disebut sebagai Laut Selatan Pulau Jawa. Berdasarkan pemaparan peta dan pemetaan wilayah, Kalurahan Tileng pada dasarnya memiliki potensi unggulan dari hasil daratan dibandingkan dengan kelautannya.

Dapat diamati bahwa secara geografis memang Tileng memiliki wilayah kelautan, akan tetapi laut bukan bagian dari sumber kehidupan masyarakat

setempat karena laut yang dimiliki cukup berbahaya untuk melakukan kegiatan berlaot bagi para nelayan. Meskipun begitu, hal ini dianggap memenuhi syarat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana Kalurahan Tileng masuk nominasi untuk ditetapkan sebagai Desa Maritim.

C. Demografis

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Tileng tercatat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang dan perempuan 1.187 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Tileng berjumlah 4.368 orang. Maka, dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Kalurahan Tileng masyarakat yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Dengan demikian jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.223 orang dengan kepadatan penduduk 4 Jiwa/KM². Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan jumlah penduduk :

Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM²)
Laki-laki	2.181	4.368	1.223	4
Perempuan	2.187			

Sumber: Profil Kalurahan Tileng

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur (Usia)	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
Usia 0-6 Tahun	125	119	244	6
Usia 7-12 Tahun	108	144	252	6
Usia 13-18 Tahun	178	189	367	8
Usia 19-25 Tahun	181	211	392	9
Usia 26-40 Tahun	453	490	943	22
Usia 41-55 Tahun	479	451	930	21
Usia 56-65 Tahun	312	276	588	13
Usia 65-75 Tahun	319	286	605	14
Usia >75 Tahun	26	21	47	1
Jumlah Total	2181	2187	4368	100

Sumber: Profil Kalurahan Tileng

Penduduk Kalurahan Tileng dengan jumlah usia terbanyak 26-40 tahun yang berjumlah 943 orang dengan presentase 22% dan yang jumlahnya paling sedikit berjumlah 47 yaitu di usia >75 tahun dengan presentase 1%. Kalurahan Tileng memiliki banyak orang dewasa, terutama orang tua kalangan perempuan berjumlah 490 orang dan laki-laki 453 orang. Kemudian untuk yang berusia 75 tahun paling sedikit laki-laki mendominasi berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang. Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan golongan usia:

Berdasarkan observasi dan tinjauan lapangan komposisi usia di atas jika ditarik relevansinya dengan program Desa Budaya Maritim cenderung mengalami ketidak sinambungan antara data dengan kondisi eksisting. Pada dasarnya kegiatan dari program desa maritim diharapkan akan keterlibatan muda-mudi yang ada di Kalurahan Tileng. Akan tetapi, saat ini yang lebih banyak adalah masyarakat yang sudah berumur 26 tahun keatas yang lebih

fokus bertani dan beternak. Pemahaman akan program yang sudah adapun masih masif untuk dapat diterima apalagi untuk dijalankan. Di sisi lain, minimnya anak muda yang menetap tinggal di Kalurahan Tileng dikarenakan lebih memilih merantau keluar untuk memperoleh pekerjaan.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase
1	SD/MI	1559	36
2	SLTP/MTs	846	19
3	SLTA/MA	532	12
4	S1/Diploma	74	2
5	Putus Sekolah	1357	31
Jumlah Total (Orang)		4368	100

Sumber: Profil Kalurahan Tileng

Berdasarkan komposisi data di atas dapat dijabarkan dengan persentase penduduk yang mengenyam pendidikan tingkat SD/MI berada di posisi paling atas 36% dengan jumlah 1559 orang, disusul dengan penduduk yang tidak berpendidikan atau putus sekolah berada pada 31%, penduduk yang menamatkan diri dari SLTP/MTs berada pada persentase 19%, untuk yang tamat SLTA/MA berada di persentase 12% dan penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi hanyalah 2% dengan jumlah paling sedikit yakni 74 orang.

Berangkat dari pemaparan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di atas merupakan salah satu pendukung dari keberhasilan suatu program pembangunan yang partisipatif. Masyarakat Tileng yang sedari dulu lebih menekankan prinsip bekerja menyambung hidup sehari-hari

dengan bertani dan memelihara ternak mengesampingkan pendidikan. Hingga, saat ini hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah data kependudukan yang direkap oleh pemerintah kalurahan. Namun, meskipun begitu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Tileng tidak mengurangi pengetahuan mereka dalam menjalankan hidup sebagai masyarakat agraris. Ini terbukti sejak zaman nenek moyang mereka telah mengenal budaya bertani “Tumpangsari” yang hingga saat ini diterapkan untuk terus bertahan hidup. Maka, program maritim sendiri sebetulnya jauh dari apa yang mereka harapkan sebab, lokus kehidupan mereka adalah bertani dan memelihara ternak.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan (Mata Pencaharian)

Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Petani	3228	67.49
2	Pedagang	134	2.80
3	PNS	26	0.54
4	Tukang	64	1.34
5	Perangkat Desa	28	0.59
6	Guru	38	0.79
7	Bidan/Perawat/Dokter	7	0.15
8	TNI/Polri	2	0.04
9	Pensiunan	36	0.75
10	Buruh	537	11.23
11	Jasa Persewaan	1	0.02
12	Swasta	682	14.26
Jumlah Total (Orang)		4783	100

Sumber: Profil Kalurahan Tileng

Berdasarkan tabel di atas dapat diamati bahwa hampir sebagian besar penduduk kalurahan Tileng hidup sebagai petani dengan persentase

67,49% dengan jumlah 3.228 orang. Selanjutnya disusul dengan mata pencaharian sebagai wiraswasta dengan persentase 14,26% sejumlah 682 orang, yang bekerja sebagai buruh menempati posisi ketiga dengan persentase 11,23% sejumlah 537 orang, penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang dengan persentase 2,8% dengan jumlah 128 orang. Selebihnya adalah Tukang kayu/mebel 1,34% dengan jumlah 64 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase 0,54% sejumlah 26 orang, Pamong atau Perangkat Desa 0,59%, tenaga pendidik atau guru 0,79% dengan jumlah 38 orang, pensiunan sebanyak 36 orang dengan persentase 0,75%, bertugas sebagai TNI/Polri 0,04% dengan jumlah 2 orang, terakhir jasa persewaan 0,02% yang paling sedikit dengan jumlah 1 orang.

Berangkat dari pemaparan tersebut dalam upaya mewujudkan Desa Maritim sangat tidak mendukung. Hal ini dikarenakan penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan bahkan tidak dicantumkan dalam demografi kalurahan. Sebagaimana dalam tujuan adanya 'Desa Budaya Maritim' untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan alam pesisir. Sedangkan dalam hal ini masyarakat sendiri tidak semata-mata hidup dari kelautan, walaupun ada itu nelayan yang menjadi buruh di Sadeng milik kalurahan lain. Keberadaan laut di Kalurahan Tileng selama ini tidak dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, dan tergolong berbahaya karena berupa tebing-tebing yang langsung mengarah ke lautan lepas yakni Samudera Hindia.

D. Sosial Ekonomi

Secara garis besar Kalurahan Tileng cukup tangguh khususnya dalam hal ketahanan pangan. Berdasarkan apa yang telah tertuang pada profil kalurahan dan juga hasil dari pengamatan lapangan, bahwasannya Tileng merupakan salah satu kalurahan yang sumber perekonomiannya bersumber dari pertanian dan peternakan. Dalam pertanian masyarakat Tileng memiliki kelompok tani dengan luas lahan sebagai berikut:

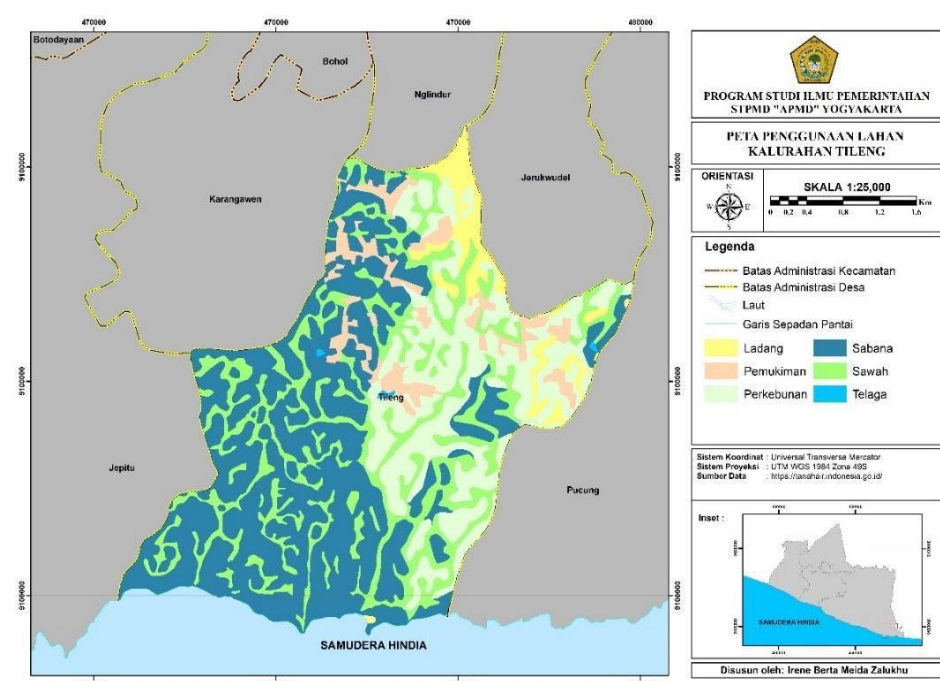
Tabel II. 5 Luas Lahan Masing-masing Kelompok Tani

No	Nama Kelompok	Luas Lahan (Ha)
1	Akur	23,25
2	Manunggal	26
3	Ngudi Basuki	43
4	Jibar Jibur	29,9
5	Ngudi Makmur	45
6	Adem Ayem	30,7
7	Tani Makmur	81,4
8	Mandesan	42
9	Tani Maju	94,2
10	Makaryo	29,1
11	Ngudi Lancar	39
12	Makmur	31,15
13	Banagung	41,4
14	Budi Makmur	21,9
15	Ploso	59,18
16	Subur	29,81
Total		1.520,00

Sumber: Profil Kalurahan Tileng

Dari luas masing-masing lahan di atas dapat dilihat bahwa secara sosial ekonomi masyarakat secara umum mengandalkan pertanian. Pertanian tadah hujan yang sejak zaman nenek moyang hingga saat ini masih berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Adapun jenis pertanian yang unggul yakni produksi tanaman padi ladang yang dapat dihasilkan sebanyak 4 ton/ha di setiap tahunnya. Selanjutnya, tanaman jagung yang dapat mencapai 52 ton/ha, serta tanaman palawija lainnya dengan kuantitas 2 ton/ha setiap kali panen dalam kurun waktu satu tahun. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah yang berprofesi petani dengan jumlah lahan yang dimiliki memang sektor pertaniannya jauh dari pertanian pada umumnya. Berikut peta tutupan lahan yang memperlihatkan wilayah yang Kalurahan Tileng yang digunakan sebagai lahan pertanian:

Gambar II. 2 Peta Penggunaan Lahan di Kalurahan Tileng



Sumber: Indonesia geospasial

Dari peta di atas dapat dilihat bahwa lahan yang digunakan untuk sektor pertanian memang sangatlah terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan lahan se-Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana Tileng berada di Kapanewon Girisubo yang mana memiliki luas lahan berupa tegalan dan kebun 3.446 hektar saja. Hal ini dibenarkan bahwa Tileng dengan luas lahan pertanian 1.520 hektar karena merupakan kalurahan/desa yang memiliki wilayah administrasi paling luas se-Girisubo. Meskipun demikian, Tileng merupakan wilayah pesisir yang dikelilingi oleh batuan kapur yang tidak bisa ditanami tanaman.

Selain itu, sumber ekonomi lainnya berasal dari peternakan yang terdiri dari hewan berupa Kambing 3.807 ekor, Sapi 3.344 ekor, dan Ayam 5.835 ekor. Maka, aspek pertanian dan peternakan inilah yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat sehingga, mampu bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, sumber perekonomian yang sebelumnya telah dijelaskan itu pada realitasnya hanya sebatas hasil panen. Hal ini dikarenakan akses masyarakat dalam melakukan jual beli hasil-hasil pertanian masih cenderung rendah. Selain dikonsumsi untuk kebutuhan pribadi, hasil-hasil pertanian tersebut hanya dijual kepada tengkulak dengan harga yang miring.

Dalam upaya mendorong program kemaritiman seperti halnya mengolah ikan atau pun gemar makan ikan tidak serta-merta dapat terwujud. Karena mengapa, masyarakat berpikir dua kali untuk membeli ikan untuk diolah apalagi untuk dikonsumsi. Kembali lagi pada permasalahan dalam daya jual beli

yang sangatlah rendah. Maka, jelas program desa maritim ini perlahan akan kalah dengan basis kehidupan masyarakat yang agraris dan rendah secara finansial. Akan tetapi tidak untuk pangannya yang bisa dikatakan sangatlah tangguh karena masyarakat mampu untuk bertahan hidup dari hasil-hasil pertanian. Bahkan ketika diadakan program perikanan pun akan gagal dikarenakan keberadaan air yang terbatas masih berlangsung.

Selain itu, adapun gambaran dari sosial ekonomi Kalurahan Tileng yang di dalamnya terdapat kelembagaan serta beberapa usaha ekonomi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terdiri atas 1 unit, dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 dan memiliki kepengurusan inti 6 orang.
2. Jasa Lembaga Keuangan terdiri atas industri kecil dan menengah seperti industri makanan sejumlah 7 unit.
3. Usaha Jasa dan Perdagangan yang terdiri atas usaha toko/kios sebanyak 6 unit, dengan jenis produk yang diperdagangkan (umum, sayur, barang dan jasa tambang dan lain-lain.
4. Usaha jasa gas, listrik, BBM dan air yang mana berupa usaha penyediaan Tenaga listrik sebanyak 1 unit, pengenceran gas dan bahan bakar 57 unit.
5. Usaha jasa keterampilan yang terdiri dari tukang kayu 115 unit, tukang batu 134 unit, tukang jahit/bordir 16 unit, tukang cukur 1 unit, tukang service elektronik 5 unit, dan tukang pijat/pengobatan 16 unit.

E. Sosial Budaya

Kalurahan Tileng dari sisi sosial budaya sudah jauh lebih baik, kehidupan berdesa yang sangat tercerminkan dengan budaya gotong-royong dan kerukunan antar umat beragama juga sudah tercapai. Hal ini terbukti dengan Kalurahan Tileng dinobatkan sebagai Desa Pancasila yang mana indikator pendukungnya adalah minimnya tindak kriminal dan aksi judi serta penggunaan miras dan obat-obat terlarang. Sehingga, kehidupan masyarakat Tileng masih berpegang erat pada nilai-nilai kehidupan sosial pedesaan yang masih kental dengan kepercayaan terhadap agama dan keseimbangan hidup dengan alam.

Selain sosial juga didukung dengan budaya masyarakat yang masih terjaga baik itu terkait kesenian, dan budaya bertahan hidup berdampingan dengan alam sekitar. Tidak hanya itu, bahkan sejak awal kalurahan ini berdiri atas kebudayaan dan nilai-nilai keratonan. Kekuatan dari keistimewaan Yogyakarta tidak bisa lepas dari aspek kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, budaya bertani ‘tumpang sari’ salah satu budaya bercocok tanam yang sudah diwarisi oleh nenek moyang masyarakat Tileng. Hadirnya program ‘Desa Budaya Maritim’ masyarakat pada umumnya menolak dengan tidak memberi hati untuk menjalankan hal-hal yang dimaksud dalam budaya maritim. Seperti budaya gemar makan ikan, mengolah ikan laut dan hal-hal lain yang diluar dari kegiatan pertanian dan peternakan. Seiringnya berjalannya waktu sekalipun adanya dorongan dari pemerintah kalurahan, masih belum ada dampak perubahan yang maksimal dalam kehidupan masyarakat kalurahan.

F. Sarana dan Prasarana

Pada umumnya Kalurahan Tileng sudah dijamah oleh pembangunan berupa sarana dan prasarana. Adanya kantor kalurahan yang merupakan bangunan baru yang disusul dengan pembangunan balai kalurahan yang sedang dalam proses pembangunan hingga saat ini. Untuk sementara segala bentuk kegiatan kalurahan dialih tempatkan di pendopo rumah Lurah yang sudah berlangsung hampir 3 tahun setelah terpilih. Terkait balai pemerintahan lainnya secara garis besar sudah ada seperti balai padukuhan dan pos ronda yang mana itu dibangun atas swadaya masyarakat setiap padukuhan.

Selain itu, sudah adanya prasarana komunikasi yang terdiri atas telepon 37.654 pelanggan GSM, tersedianya TV Umum 13, jumlah radio 782, dan Parabola 563 unit. 3. Di beberapa padukuhan seperti Papringan, Ngrombo, Puggeran, dan beberapa padukuhan yang jauh dari pusat kalurahan yang sedikit mengalami susah sinyal. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di 8 padukuhan yang dimana hal ini masih menjadi permasalahan karena ada padukuhan yang masih harus membeli air setiap minggunya untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Ketersediaan sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak.

Sarana dan prasarana rumah produksi khusus dalam hal ini ‘Rumah Olahan’, sekolah formal maupun informal berupa ‘Sekolah Alam Pesisir’, serta Kios Maritim yang dibangun berdasarkan inisiatif dari Pemerintah Kalurahan Tileng. Padahal secara mendasar masyarakat yang hidup dari kegiatan agraris

baik itu bertani maupun beternak sangat mengharapkan pemerataan air bersih, dan juga untuk mendukung ketahanan pangan berupa pembagian bibit pertanian yang belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah kalurahan. Upaya untuk dapat meningkatkan ekonomi melalui pengoptimalisasian jalan usaha tani masih belum mampu untuk terjawab.

Kendati demikian, masyarakat kecewa mengapa kemudian program dari Desa Budaya Maritim itu diterapkan di Tileng, sedangkan ada gal lain yang lebih mendasar untuk dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng, selain membangun bangunan yang kemanfaatannya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang memadai khususnya jalan masih belum dapat tercapai selain air bersih. Meskipun daerah yang mayoritas kegiatan masyarakat petani namun, hingga saat ini belum memiliki irigasi pengairan.

G. Pemerintah Kalurahan

Kalurahan Tileng mempunyai kondisi Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Pemerintahan yang terdiri dari pamong-pamong kalurahan yang meliputi 1 orang Lurah (Kepala Desa), 1 orang Carik (Sekretaris Desa), 27 orang Pamong Klaurahan (Perangkat Desa) dan mitra pemerintah yakni 9 orang Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Selain itu adanya Lembaga Kemasyarakatan seperti LPMP, PKK, Posyandu, Pengajian, Arisan, Simpan Pinjam, Kelompok Tani, Gapoktan, Karang Taruna, RT dan RW.

Pada dasarnya keberadaan lembaga-lembaga tersebut sudah berjalan meskipun saat ini mengalami ketidakstabilan. Terkait program kemaritiman

sudah dibentuk kelompok olahan sebanyak 5 kelompok yang tersebar di 5 padukuhan. Kelompok olahan tersebut juga mengalami kendala karena belum siap dengan mengolah hasil laut karena sulit untuk didapat dan pemasarannya juga demikian. Namun, sejauh ini pemerintah terus berusaha mendorong masyarakat dari kalangan ibu-ibu dan anak muda untuk menyukseskan program desa budaya maritim tersebut. Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapati bahwa pemerintah kalurahan cenderung sangat mendominasi, hal ini dibuktikan dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan bukan berdasarkan dari apa yang diaspirasikan oleh masyarakat melainkan program titipan dari pemerintah Daerah DIY dan inisiatif pemerintah kalurahan sendiri, yang mana bertolak belakan dengan aspek kehidupan masyarakat.

H. Visi Misi

Demokrasi mengisyaratkan makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dengan pertimbangan diatas pada dasarnya untuk perjalanan waktu 6 tahun yang diharapkan terealisasinya proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Lurah dan pamong, operasional pemerintahan kalurahan, tunjangan operasional BPKal, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Kalurahan Tileng dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi Kalurahan

“ MAJU BARENG”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur dari Lurah yang saat ini menjabat untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Tileng. Dalam hal ini, baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Kalurahan Tileng mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan dan mengangkat nilai budaya yang ada di Desa Tileng.

2. Misi Kalurahan

- a. Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
- b. Transparansi pelaporan dan tata kelola pemerintah desa
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

- d. Maksimalisasi partisipasi (keterlibatan) warga masyarakat dalam proses pembangunan
- e. Maksimalisasi fungsi-fungsi kelembagaan
- f. Bersinergi dengan lembaga sosial dan lembaga masyarakat lainnya secara maksimal
- g. Maksimalisasi fungsi-fungsi tanah pertanian supaya lebih produktif
- h. Smart Village

Pada dasarnya apa yang termuat dalam visi misi Kalurahan Tileng tersebut sangat baik dalam mendorong proses terwujudnya dinamika kehidupan berdesa. Akan tetapi, sebagaimana hal-hal tersebut tertuang dalam profil Kalurahan Tileng yang pada pelaksanaannya masih mengalami kontradiksi terutama dalam hal mewujudkan pembangunan yang mengedepankan nilai budaya yang ada dalam masyarakat kaitannya dengan program Desa Budaya Maritim. Masyarakat yang sedari dulu terbiasa dengan budaya bertani serta beternak yang hadir dengan nilai-nilai budaya serta lokalitas yang unik seolah didorong untuk menerima budaya maritim sebagai upaya peningkatan ekonomi serta kesejahteraan dan taraf hidup. Sehingga, dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan pada dasarnya baik namun bertolak belakang dengan masyarakat.

BAB IV

**MEMBONGKAR KONTRADIKSI PENERAPAN PROGRAM DESA
MARITIM DI KALURAHAN TILENG**

A. Konsep Desa Maritim: Antara Idealisme dan Realitas Implementasi

**1. Analisis Idealisme Konsep Desa Maritim Ala Daerah Istimewa
Yogyakarta**

Program Desa Maritim merupakan salah satu bagian dari arah kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur DIY. Sejalan dengan itu, maka wilayah atau kawasan Pesisir Selatan DIY dijadikan sebagai kiblat dari pembangunan sebagaimana yang termuat dalam Visi Misi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pemerintahan dibawah naungan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejatinya sebagai pemegang otoritas dan kekuasaan yang absolut. Oleh karena itu, kaitannya deng program Desa Maritim tidak terlepas dari konsep besar yang telah digagas dalam Keistimewaan DIY dengan istilah “*Among Tani Dagang Layar*” melalui pengembangan kehidupan agraris-maritim dalam upaya memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Konsep Desa Maritim yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Paniradya Kaistimewaan kaitannya dengan pemberian dana Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan DIY, yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk melakukan pendampingan

langsung secara teknis terhadap desa-desa yang diberikan program Desa Maritim. Pada dasarnya pemberian program Desa Maritim ini mengungkap aspek-aspek penting yang meliputi pemanfaatan potensi kemaritiman, pengembangan ekonomi yang berbasis kelautan dan perikanan, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta yang paling utama adalah peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat kalurahan. Idealisme yang mendasari konsep Desa Maritim secara garis besar termuat dalam Visi Misi Gubernur DIY, menyadari bahwa ketersediaan modal budaya saja tidak akan cukup mendorong tercapainya kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu dibutuhkan karsa (kemauan) yang kuat dari masyarakat khususnya di pedesaan.

Kondisi kehidupan masyarakat yang masih terbelenggu oleh kemiskinan dan keterbelakangan menjadi salah satu alasan mengapa desa/kalurahan perlu untuk di reformasi, dengan pemberian BKK (Bantuan Keuangan Khusus) yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat perekonomian masyarakat desa yang setapak lebih maju. Kalurahan sebagaimana sebutan bagi desa yang berada di wilayah DIY dimaknai sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dan pemerintah kalurahannya berhak serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Danais kepada Kalurahan Tileng di tahun 2021-2022 yang mana

merupakan usulan langsung dari pemerintah Kalurahan Tileng, sebagaimana telah memenuhi syarat untuk mengklaim dana keistimewaan.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan DIY secara garis besar mengisyaratkan penerapan program Desa Maritim mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tileng. Konsep dari Desa Maritim sendiri berdasarkan kajian dinas menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta potensi yang ada di desa maritim tersebut. Pengembangan Desa Maritim di DIY dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal. Secara komprehensif dalam pengembangannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan harkat dan martabat, serta rasa percaya diri atas dasar tatanan budaya nilai budaya masyarakat.

Kalurahan Tileng ditetapkan sebagai Desa Maritim yang mendapatkan dana keistimewaan tersebut merupakan peristiwa gayung bersambut antara Pemerintah Kalurahan Tileng dengan Pemerintah Daerah DIY. Dinas Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat untuk mendampingi secara teknis menjelaskan bahwa hanya desa yang memiliki wilayah laut yang berhak mendapatkan program tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Kalurahan Tileng menangkap sinyal hijau dan mengusung Kalurahan Tileng mendapatkan predikat sebagai Desa Maritim. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah DIY menyediakan dana BKK Danais untuk pelaksanaan kegiatan. Program Desa Maritim merupakan salah satu bentuk dari

perwujudan kehendak baik Pemerintah Daerah DIY untuk mengangkat derajat dan harkat masyarakat desa, agar keluar dari zona ketertinggalan dan kemiskinan.

Konsep Desa Maritim ala DIY sejalan dengan yang dicetuskan oleh Tania Li (2007), yang menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam upaya pembangunan. Artinya, setiap desa memiliki dinamika sosial yang unik, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proyek pembangunan yang akan diselenggarakan. Pada konsep Desa Maritim yang termuat baik dalam Visi Misi Gubernur DIY, selanjutnya dipertegas lagi dalam kajian pengembangan Desa Maritim yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, dimana adanya upaya integrasi konteks sosial dan budaya dalam memahami nilai-nilai, tradisi maupun praktik kehidupan masyarakat setempat yang bermukim di suatu desa. Kendati demikian, dalam penetapan sebuah program perlu untuk melihat apakah wilayah yang diberikan program Desa Maritim sejalan dengan konteks kehidupan sosial maupun budaya yang telah terbangun dalam masyarakat desa itu sendiri.

2. Analisis Realitas Implementasi Program Desa Maritim Di Kalurahan Tileng

Kalurahan Tileng yang secara geografis memiliki wilayah kelautan yang berbatasan langsung dengan laut Samudera Hindia. Meskipun demikian, pada realita kehidupan sosial dan budaya masyarakat cenderung pada sektor agraris yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani

tadah hujan, serta dibarengi dengan peternakan. Kalurahan Tileng yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang dikenal dengan banyaknya pantai dan destinasi wisata lainnya, hal ini dikarenakan kabupaten ini memang menjadi salah satu wilayah Pesisir Selatannya DIY. Meskipun demikian, Kalurahan Tileng secara administrasi wilayah tidak memiliki pantai seperti kalurahan lain yang ada di Gunungkidul, melainkan berupa tebing yang selama ini masyarakat lokal menjadikannya sebagai tempat pemancingan. Masyarakat yang berprofesi nelayan juga dapat dihitung dengan jari yang ada di beberapa padukuhan saja. Akan tetapi, keberadaan wilayah kelautan berupa tebing tersebut yang diunggulkan oleh Kalurahan Tileng sehingga memenuhi kriteria untuk mengklaim Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, dengan pemberian predikat Desa Maritim.

Desa Maritim adalah konsep yang secara umum diberikan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi sejak didapatkannya informasi terkait program tersebut Pemerintah Kalurahan Tileng mengusungnya dengan istilah Desa Budaya Maritim baik dalam proposal pengusulan program dan juga ketika program tersebut disetujui dan mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah Kalurahan Tileng berusaha untuk mensosialisasikan pemahaman terkait Desa Budaya Maritim harapannya dengan penyematan unsur budaya masyarakat lebih mampu mendekati pemahaman makna dari maritim dan menjadikan kemaritiman sebagai pola hidup yang perlu untuk dibiasakan. Pilihan akan program

maritim sendiri bukan semata-mata ada begitu saja, melainkan keinginan besar Pemerintah Kalurahan Tileng dalam mempercepat pembangunan yang nantinya berdampak positif bagi masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan pencermatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) sebagai dokumen yang memuat aspirasi masyarakat memang tidak tertuang dengan ketetapan yang pasti, bahwa nantinya Kalurahan Tileng akan didorong untuk menjadi Desa Maritim.

Meskipun demikian, dengan diberikannya anggaran sebesar 500 juta di tahun 2022 dan 750 juta di tahun 2022, pelaksanaan program Desa Maritim sudah tampak dari sisi pembangunan gedung-gedung yang ditempatkan di beberapa padukuhan seperti, Sekolah Alam Pesisir dan Rumah Olahan di Padukuhan Nanas, serta Kios Maritim di Padukuhan Teken. Selain itu, upaya penguatan kapasitas bagi masyarakat dalam mendukung program maritim dalam pemanfaatan bangunan-bangunan yang telah dengan membentuk kelompok olahan dan memberikan pelatihan-pelatihan olahan yang didampingi juga oleh OPD terkait. Namun, pada pelaksanaan program Desa Maritim tersebut berhasil secara realisasi anggaran melalui pembangunan fisik, akan tetapi masyarakatnya masih tertinggal di landasan. Artinya, pembangunan yang telah dilakukan tersebut terpaut jauh dengan sumber daya manusia yang belum mampu mengimbangi pembangunan fisik yang hampir sebagian besar telah terealisasi. Selain keterbatasan kemampuan secara intelektual, masyarakat di Kalurahan Tileng merasa bahwasannya program Desa Maritim bukan

untuk mereka karena pada hakekatnya mereka adalah petani, yang sehari-harinya menghabiskan waktu untuk berladang sambil beternak.

Penerapan program dari Desa Maritim menciptakan tantangan dan kendala dalam penerapannya. Tidak sedikit masyarakat yang menolak dan bahkan tidak peduli dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Kalurahan Tileng. Realitas implementasi program Desa Maritim dimaknai sebagai proyek pembangunan. Apabila dimaknai secara kritis fenomena ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kalurahan Tileng dalam upaya pembangunan, terutama ketika kalurahan yang menerapkan program Desa Maritim mayoritas petani bukan nelayan, sehingga menjadikan Kalurahan Tileng Desa Maritim rasa agraris.

3. Analisis Kesenjangan Antara Idealisme Konsep Desa Maritim dan Realitas Implementasi Yang Terjadi Di Kalurahan Tileng

Berangkat dari pemaparan konsep idealisme dan realita penerapan Program Desa Maritim di Kalurahan Tileng, dalam hal ini secara nyata memicu kontradiksi. Konsep yang diidealkan oleh pemberi anggaran melalui Dinas Kelautan dan Perikanan konsep Desa Martim digagas untuk pengembangan sektor agraris-maritim mengalami ketimpangan kaitannya dengan fokus pengembangan yang belum sesuai. Artinya, konsep dari Desa Maritim yang digagas dengan ideal secara garis besar mengutamakan pengembangan sektor maritim yang meliputi perikanan, pariwisata serta industri kelautan lainnya. Akan tetapi, jika dilihat pada konteks penerapannya di Kalurahan Tileng yang masyarakatnya mayoritas hidup

sebagai petani tadah hujan, dengan kebutuhan serta potensi sektor pertanian yang lebih dominan dibandingkan sektor agraris. Dapat dipahami ketika Pemerintah Kalurahan Tileng lebih terfokus pada pembangunan fisik untuk mendukung sektor maritim, maka muncul kesenjangan antara kehendak pemerintah kalurahan dengan keinginan serta harapan masyarakat yang mengakui secara karsa bahwa mereka adalah petani.

Fenomena kontradiksi yang terjadi di Kalurahan Tileng terkait penerapan program Desa Maritim mengandung rasionalitas tindakan pemerintah yang bukan menjadi rahasia umum lagi. Penyelenggaraan pembangunan melalui program Desa Maritim di Kalurahan Tileng tidak sepenuhnya menjadi kesalahan atau kegagalan dari pemerintah kalurahan. Sebab, hal ini dilandasi dengan berbagai pertimbangan baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Benar bahwa memang masyarakat Kalurahan Tileng bukan penghasil ikan, tetapi ada peluang untuk menciptakan produk dari ikan. Sejak dulu sektor agraris masih berada diposisi yang *stagnan* dan kecil kemungkinan untuk diorbitkan. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah tidak mendukung sektor pertanian maupun peternakan, wajib bagi pemerintah kalurahan untuk tetap mendukung aspek tersebut sesuai dengan porsinya.

Fenomena penerapan budaya maritim yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng merupakan bentuk tindakan untuk memperkecil kerugian. Alasan yang mendasar adalah jika mengorbitkan sektor agraria atau maritim, pada dasarnya sama-sama memiliki dampak

kerugian masing-masing. Jika pemerintah Kalurahan memilih untuk terus mengorbitkan pertanian, maka tidak akan ada hasil yang signifikan yang diperoleh. Hal ini dikarenakan antara jumlah petani dan lahan yang tersedia untuk dikelola mengalami ketimpangan, dimana jumlah petani lebih banyak dibandingkan dengan luas dari lahan pertanian sangat kecil. Disisi lain, mengorbitkan aspek maritim juga rugi, karena masyarakat Kalurahan Tileng bukan nelayan penghasil ikan seperti pada umumnya. Maka, dipertimbangkan dari kedua aspek tersebut yang lebih rugi untuk diorbitkan adalah sektor pertanian, sehingga pemerintah kalurahan memilih maritim yang berpeluang untuk mendapatkan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY melalui program Desa Maritim. Pemerintah Kalurahan Tileng mengambil sikap *“daripada mengutuk batu menjadi tanah, lebih baik mendatangkan ikan untuk diolah dan menghasilkan produk baru yang lebih memungkinkan”*. Sekalipun, pada penerapannya mengalami tantangan dan kendala dari sisi masyarakat yang merasa dikorbit untuk menerapkan budaya maritim dalam kehidupan sehari-hari.

Kesenjangan antara idealnya konsep desa maritim dengan realita penerapan di lapangan juga ikut menyoroti perbedaan pengetahuan dan keterampilan antara petani dan nelayan tidak bisa kemudian disamaratakan. Terbukti bahwa masyarakat di Kalurahan Tileng masih membutuhkan pelatihan untuk penangkapan ikan dan budidaya perikanan, sehingga hal ini pendorong terkendalanya implementasi program Desa Maritim. Sekalipun dibayangkan bahwa mengarahkan budaya maritim dapat saja dilakukan,

namun pengembangan sektor tersebut di kayangan masyarakat yang mayoritas petani perlu untuk ditingkatkan. Disisi lain, infrastruktur dan sumber daya yang tersedia belum memadai, dari sisi kebutuhan dasar seperti halnya masalah air bersih di delapan padukuhan. Artinya, setengah dari wilayah administrasi Kalurahan tileng masih mengalami persoalan air, lantas bagaimana kemudian bisa menjalankan program Desa Maritim sebagaimana yang diharapkan.

Tidak hanya itu, apabila masyarakat yang mayoritas petani digiring untuk beralih ke sektor maritim, dalam hal ini melibatkan peralihan pola hidup juga pandangan untuk alternatif mata pencaharian masyarakat yang semula agraris menjadi maritim. Sekalipun tidak secara langsung terjun menjadi nelayan, akan tetapi slogan ‘gemar makan ikan’ ataupun kegiatan mengolah ikan yang terus diprospek oleh pemerintah kalurahan, pada akhirnya tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Realita bahwa penerapan program Desa Maritim tidak dapat diseimbangkan dengan konsep ideal yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui perpanjangan tangannya Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukannya pendekatan yang lebih responsif dan kontekstual menyesuaikan dengan kondisi eksisting lokal Kalurahan Tileng.

Pemerintah Kalurahan dibentuk secara politik oleh masyarakat, yang mana dapat diartikan bahwa Lurah yang merupakan sebutan lain bagi Kepala Desa selain menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat juga sebagai

kepala kesatuan hukum dan adat. Maka, dengan kata lain, Kalurahan adalah sebutan asli untuk desa khasnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebutan Kalurahan terhadap Desa yang ada di DIY sudah jauh terdahulu digagas oleh masa Kerajaan Mataram Kuno. Selaras dengan itu, program Desa Maritim yang secara ideal digagas oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan., yang ditempuh dengan cara Reformasi Kalurahan khususnya pada aspek pemberdayaan. Reformasi yang dimaksud pada dasarnya memiliki tonggak politik, sekalipun itu dalam upaya pemberdayaan. Dalam upaya reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan seperti yang telah disampaikan oleh KPH. H. Yudanegara, Ph.D akan tercapai apabila agenda yang dilakukan tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dengan elemen masyarakat.

Dalam mencapai reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan sangat perlu untuk emansipasi, artinya kalurahan memiliki andil dan peran tidak sekedar menjadi penerima manfaat, akan tetapi menjadi pemberi manfaat. Ketika berbicara reformasi pemberdayaan masyarakat maka, bangunan besar atau kekuatan serta bangunan besarnya adalah tahta untuk masyarakat. Seperti halnya penerapan Budaya Maritim di Kalurahan Tileng yang mana merupakan program titipan yang diklaim oleh Pemerintah Kalurahan Tileng itu sendiri dalam upaya mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prakteknya, belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari

tantangan mau kendala. Dalam mewujudkan program Desa Maritim, secara mendasar pelaksanaan dan realisasi anggaran harus selaras dengan model pengembangan yang telah ditetapkan oleh pemberi dana melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengawal pelaksanaan dan realisasi anggaran. Penilaian terhadap program Desa Maritim yang terlaksana di Kalurahan Tileng terjebak pada orientasi sektoral, yang memicu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat kalurahan.

Program Desa Maritim dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk dari upaya reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang selanjutnya diterapkan di Kalurahan Tileng sebagai bentuk pembudayaan Desa Budaya Maritim. Orientasi pembangunan yang diharapkan malah terjebak pada anggaran yang terpusat pada pembangunan fisik. Anggaran yang merupakan hasil dari mengklaim dana keistimewaan yang menjadi acuan pelaksanaan proyek pembangunan. Reformasi pemberdayaan belum mampu dicapai, yang terjadi malah upaya menghilangkan fungsi-fungsi serta nilai-nilai dari desa/kalurahan yang awalnya bersatu untuk mencapai kebaikan bersama. Kalurahan sebagai pendekatan pembangunan bukan hanya perkara pekerjaan proyek, akan tetapi menempatkan kalurahan sebagai subjek yang punya prakarsa dari bawah sebagaimana telah dibangun oleh masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Kalurahan Tileng adalah niat baik membangun kalurahan/desa, dimana sebagai akselerasi dari Pemerintah Daerah Istimewa yang kemudian diteruskan oleh pemerintah kalurahan dalam bingkai reformasi.

Seharusnya desa/kalurahan membangun sebagai kewenangan lokal yang melibatkan seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Kalurahan dalam pendekatan pembangunan maupun pemberdayaan tidak boleh kemudian ditempatkan sebagai target dengan memberikan label sebagai “Desa Maritim”. Sebab, hal tersebut membuat jebakan tersendiri bagi kalurahan untuk memaknai reformasi dengan logika proyek. Maka, pada dasarnya memang bukan berarti meninggalkan, akan tetapi penting bagi kalurahan/desa untuk menemukan jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, sejatinya reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang digagas oleh DIY melalui pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan pesisir selatan sudah seharusnya memiliki titik temu. Apabila kalurahan terjebak pada prinsip desa membangun yang sangat lokal maka, akan dijerat oleh kemiskinan itu sendiri. Kendati demikian, reformasi pemberdayaan masyarakat yang digaungkan tersebut hanya sekedar khayalan yang semu.

Berdasarkan sudut pandang pihak Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Pemerintah Kalurahan Tileng dinilai sudah menjalankan program Desa Maritim melalui penerapan budaya maritim baik dari sisi pembangunan fisik (Sekolah Alam, Rumah Olahan, Kios Maritim, dll), maupun non fisik (pemberdayaan berupa sosialisasi dan pelatihan-pelatihan) dengan *output* sebatas laporan tertulis. Benar bahwa Kalurahan Tileng di bawah salah satu kalurahan yang tertib administrasi dalam melaporkan program kegiatan yang telah terlaksana di setiap tahun anggaran. Akan tetapi, apa yang dilaporkan tersebut hanyalah nominal dari BKK Danais yang telah terlaksana namun untuk *feedback*

manfaatnya terhadap masyarakat belum tercapai. Kalurahan Tileng yang mayoritas hidup dari sektor agraris kaya akan hasil pertanian dan peternakan, lantas dalam kajian yang dilakukan dinas tersebut secara umum menetapkan indikator agraris kaitannya dalam pemanfaatan lahan pasir, sedangkan lahan yang ada di Kalurahan Tileng tidak bersifat demikian.

B. Melampaui Paradigma Program Desa Maritim: Memahami Kontradiksi Sebagai Dinamika Relasi Kuasa

Program adalah kekuasaan yang kontradiktif. Demikian kalimat yang menggambarkan kompleksitas ketika program pembangunan dalam proses renyut relasi kuasa. Sejatinya relasi kuasa bersifat dinamis dan multidimensional, serta memiliki orientasi yang tidak hanya berbicara terkait hubungan atau interaksi yang dominatif antara satu pihak dengan pihak yang lain (Michel Foucault, 1970). Artinya, kekuasaan dapat hadir dimana saja dalam segala aspek kehidupan sosial, dimana dalam mengendalikan kekuasaan sudah pasti melibatkan tindakan-tindakan yang kompleks dan beragam. Selama ini kekuasaan dimaknai sebagai pelimpahan dari atas ke bawah, akan tetapi melampaui itu kekuasaan sebenarnya dapat hadir dan beroperasi di berbagai tataran tingkat dan juga bentuk yang bermacam-macam.

1. Program Desa Maritim Dalam Bingkai Pelaksanaan Kebijakan Strategis Gubernur DIY

Penerapan Desa Budaya Maritim sebagaimana peristiwa gayung bersambut yang terjadi antara Pemerintah Kalurahan Tileng terhadap arah kebijakan strategis Gubernur DIY. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 37

Tahun 2022 tentang penugasan Urusan Keistimewaan dan Dana Keistimewaan yang di dalamnya terdapat beberapa program salah satunya program Desa Maritim yang ditema oleh Kalurahan Tileng terhitung sejak tahun tahun 2021. Pendistribusian anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY terhadap Kalurahan Tileng secara nyata merupakan mekanisme pelimpahan pemanfaatan kekuasaan dalam kerangka relasi kuasa. Dengan demikian, pemerintah provinsi mempunyai andil untuk mempengaruhi dan mengatur agenda maupun prioritas pembangunan yang akan dilakukan di tingkat kalurahan. Melalui Paniradya DIY dan seterusnya secara teknis didampingi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, terciptanya kontrol anggaran dan pengawasan atas Kalurahan Tileng.

Pada tingkat lokal relasi kuasa dioperasikan melalui sumber daya finansial, yang dimana merepresentasikan mekanisme governmentality. Perlu di garis bawahi, dalam sistem pemerintahan yang berlangsung di DIY berbeda dengan provinsi lain. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Pemerintah Daerah yang menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan Otonomi Khusus yang dimiliki sebagai pemegang otoritas dan kekuasaan yang absolut. Meskipun demikian, pada dasarnya program Desa Maritim yang diberikan terhadap Kalurahan Tileng merupakan usulan langsung dari Kalurahan. Artinya, pemerintah Kalurahan Tileng yang paham dan mengetahui apa yang menjadi potensi yang ada di kalurahannya. Sebagai bentuk negosiasi, Pemerintah provinsi DIY yang berperan

mendistribusikan anggaran tindakan atas permintaan Kalurahan Tileng sendiri. Meskipun, pada pelaksanaannya konsep Program Maritim mengikat Kalurahan Tileng di bawah kontrol pemerintah provinsi.

Keberlangsungan relasi kuasa yang terjalin pemerintah provinsi DIY terhadap Kalurahan Tileng, pada dasarnya telah diberikan ruang untuk melakukan perundingan yang dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan pada program Desa Maritim sebagaimana yang telah tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proposal Desa Budaya Maritim yang dimohonkan langsung kepada Gubernur DIY. Sinyal hijau yang ditangkap oleh Pemerintah Kalurahan Tileng bersumber dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang ditugaskan dalam mendampingi pemberian BKK Dana Keistimewaan DIY. Transfer informasi tersebut yang menjadi pintu masuk bagi Kalurahan Tileng mengingat syarat utama kriteria Desa Maritim telah dimiliki.

Pada Konsep Desa Maritim yang ditetapkan oleh dinas kemudian diadopsi oleh Kalurahan Tileng dapat dikritisi karena masih belum sepenuhnya mampu untuk menjawab persoalan yang mendasar bagi kalurahan yang berada di Kawasan Pesisir Selatan, khususnya Kalurahan Tileng. Diakui bahwa kajian konsep maupun model pengembangan yang telah dirancang oleh dinas bersifat umum seolah-olah dapat diterapkan di semua kalurahan yang masuk dalam kawasan pesisir selatan DIY. Perlunya kajian studi kelayakan yang memadai, karena kenyataannya terjadi kesenjangan antara kebutuhan yang mendasar dengan potensi kalurahan.

Respon masyarakat lokal terhadap program pembangunan yang cenderung difokuskan pada bangunan fisik akan mengalami kegagalan fungsi yang berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah seharusnya keluar dari zona nyaman sebatas laporan administrasi. Dalam konteks relasi kuasa yang bernegosiasi dan bekerja secara aktif adalah pendamping yakni dinas, karena pada sistem pemerintahan hal tersebut sudah diatur dalam tugas dan fungsi masing-masing.

Kritik lain dalam konteks program Desa Maritim dilihat dari kurangnya pemahaman dan penyesuaian terhadap indikator yang meliputi karakteristik, kebutuhan, serta potensi yang memadai. Ketika tidak lagi sejalan dengan konteks lokal, maka jelas bahwa pendampingan yang diberikan tidak efektif. Dampaknya adalah pembangunan melalui program Desa Maritim tidak bermanfaat apalagi berkelanjutan bagi kehidupan berdesa kaitannya dalam mengembangkan potensi agraris-maritim.

Kendati demikian, pada hakekatnya umpan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi DIY perlahan akan meminimalisir otonomi dan kemandirian Kalurahan Tileng dalam mengambil keputusan akan penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi ketika Pemerintah Kalurahan Tileng diikat dengan ketat oleh aturan penggunaan anggaran, sehingga membuat terbatasnya ruang untuk menentukan prioritas pembangunan yang memang benar-benar menjadi aspirasi masyarakat di tingkat kalurahan. Meskipun disadari bahwa

pemberian anggaran yang dikendalikan tersebut memungkinkan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan secara adil dan merata.

Terjadinya ketimpangan distribusi sumber daya dapat tercipta, ketika beberapa kalurahan yang sesungguhnya memiliki kriteria dan potensi maritim yang perlu didorong dan cocok dengan model pengembangan yang telah ditetapkan, akan tetapi belum memiliki hubungan politik atau pengaruh yang kuat sehingga memperoleh bagian yang cukup dan bahkan ada yang tidak terjamahi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwasannya kebijakan yang diambil transaksi distribusi anggaran tidak kemudian meninggalkan otonomi lokal desa. Pendampingan yang dilakukan oleh OPD perlu mengkaji lebih dalam kelayakan pemberian program Desa Maritim terhadap desa. Harapannya agar distribusi sumber daya, dan partisipasi masyarakat dapat menghasilkan pembangunan yang partisipatif berlandaskan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat.

2. Relasi Kuasa Antara Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat terhadap Kontradiksi Program Desa Maritim Di Kalurahan Tileng

Penerapan program Desa Maritim memicu kontradiksi antara Pemerintah Kalurahan Tileng dengan masyarakat, hal ini erat kaitannya pada penyelenggaraan pembangunan yang dinilai tidak menjawab kebutuhan dasar. Pada pembahasan terkait realitas penerapan program desa maritim, bahwa di balik fenomena ini terdapat rasionalitas tindakan Pemerintah Kalurahan Tileng dalam mengambil sikap untuk memilih program Desa Maritim. Terlepas dari ketimpangan yang terjadi antara

idealisme konsep dengan realitas penerapan program yang cenderung pada proyek pembangunan, perlu dipahami bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dinamika relasi kuasa.

Relevansi pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa membantu mengarahkan pemahaman bahwa kendali kekuasaan beroperasi pada praktik-praktik pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan melalui program Desa Maritim yang terjadi di Tileng menunjukkan kontrol yang salah satu diantaranya dengan menggiring budaya maritim rasa agraris dapat terpola dalam kehidupan masyarakat kalurahan. Relasi kuasa yang tercipta antara pemerintah kalurah dan masyarakat dalam konteks ini bukanlah resistensi, melakukan negosiasi dalam menjalankan program. Aspirasi masyarakat yang dimuat dalam RPJMKal merupakan bentuk negosiasi yang berhasil disepakati secara politik. Dalam konteks kehidupan berdesa, pemilik kekuasaan dan kedaulatan adalah masyarakat. Apabila, realisasi pembangunan yang terwujud hanya sekedar proyek pembangunan semata, maka disitulah pemerintah kalurahan ingkar terhadap masyarakat.

Pelaksanaan program pembangunan melalui program Desa Maritim yang diikat oleh kekuasaan supra desa, membatasi ruang bagi pemerintah kalurahan. Artinya, ingkarnya Pemerintah Kalurahan Tileng terhadap masyarakat bukan sepenuhnya menjadi kesalahan dari pemerintah kalurahan, melainkan konsekuensi dari alokasi anggaran yang diterima dari provinsi DIY. Terlepas dari itu, pemerintah sering kali memposisikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan dengan mengabaikan

pengetahuan lokal yang mengandung tatanan nilai yang hidup dan berkembang dari masyarakat. Seperti yang disoroti oleh pemikiran Tania Murray Li, bahwa kadangkala pembangunan diberbagai sektor baik itu agraris atau maritim yang dilakukan oleh pemerintah cenderung terjebak dalam logika proyek dan pendekatan teknis yang tidak dipertimbangkan secara holistik sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Ketegangan tersebut serupa dengan yang terjadi dalam proyek pembangunan Desa Maritim di Kalurahan Tileng. Fokus pembangunan yang diarahkan untuk menunjang program Desa Maritim dengan teknis-teknis pembangunan yang masyarakat Tileng sendiri belum cukup siap untuk menerimanya.

Pemerintah Kalurahan Tileng menjalankan telah menjalankan kekuasaannya dalam menentukan arah implementasi pembangunan, masalahnya masyarakat juga seringkali acuh tidak acuh dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Alasannya karena pemerintah kalurahan bertindak memilih program Desa Maritim, padahal masyarakat sendiri mengakui bahwa dalam sektor agraris baik itu pertanian tadah hujan dan peternakan yang mereka tekuni selama ini menghadapi kendala yang sangat kompleks, selain keterbatasan lahan pertanian yang tersedia, daya beli hasil pertanian pun sangat merosot. Maka, perlu bagi masyarakat untuk berani keluar dari zona nyaman dan mulai terlibat dalam proses pembangunan. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah berhenti saling menyalahkan. Pemerintah kalurahan tidak lebih kuat dari masyarakat, sebaliknya masyarakat pun demikian tidak lebih kuat dan berkuasa atas

pemerintah kalurahan. Kendati demikian, yang diharapkan dalam upaya pembangunan adalah relasi kuasa yang dioperasikan secara produktif, bukan dengan praktik-praktik yang dominatif.

BAB V

**REFLEKSI DAN REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN
MELALUI PROGRAM DESA MARITIM**

Ketika dihadapkan dengan kegagalan maka berefleksi adalah hal yang paling tepat untuk mengevaluasi dan melihat kembali apa yang telah terjadi. Sekalipun yang dilakukan itu merupakan kehendak baik, akan tetapi terkadang dalam mewujudkan kehendak tersebut ada hal-hal yang ditempuh secara keliru. Sebaliknya, sekalipun itu dilakukan dengan benar tidak pula menutup kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Demikian, juga dengan pembangunan. *Pertama*, penting untuk diakui bahwa kontradiksi yang terjadi pada penerapan Program Desa Maritim seperti yang terjadi di Kalurahan Tileng, munculnya pertentangan antara masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, akan tetapi menolak lupa bahwa masyarakat selama ini kurang berpartisipasi dalam setiap proses yang berlangsung dalam kehidupan berdesa.

Kedua, penting bagi desa untuk duduk bersama melalui ruang-ruang partisipasi mulai dari yang kecil hingga pada ruang yang lebih besar untuk merumuskan secara bersama-sama implementasi dari program pembangunan yang tidak terbatas hanya pada program Desa Maritim, melainkan di setiap program pembangunan terutama yang sifatnya titipan dari kabupaten/kota, maupun provinsi. *Ketiga*, Pendekatan secara holistik perlu untuk dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik itu sosial, politik, budaya, ekonom, serta ekologi dalam penerapan program. Artinya, program Desa Mariti jangan serta-

merta fokus pada maritim yang berbasis pembangunan gedung yang dijalankan sebagai sebuah proyek pembangunan, akan tetapi pembangunan yang turut memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Ketiga, memperhatikan ketersediaan potensi pengetahuan lokal meskipun masih tradisional seperti budaya pertanian tumpang sari yang masih dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Tileng, perlu untuk didorong dan dielaborasi dengan maritim sesuai dengan porsinya. Artinya, ketika hendak melakukan kegiatan mengolah ikan, akan tetapi sulit ikan sulit untuk didapatkan karena Tileng bukanlah masyarakat nelayan yang menghasilkan ikan, dalam hal ini minimal pemerintah kalurahan mendorong pemanfaatan hasil-hasil pertanian masyarakat lokal. Dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal, praktik-praktik tradisional, serta tatanan nilai yang sudah sejak lama menjadi denyut nadi masyarakat agraris, sekalipun menggandeng maritim yang masih dalam tahap pengembangan, dapat dipastikan akan memperoleh daya dukung akan keberlanjutan dari program tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi paradigma pembangunan program Desa Maritim dapat terwujud.

Keempat, evaluasi dan pembaharuan yang berkelanjutan perlu untuk terus dilakukan. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tidak cukup hanya melakukan kajian pengembangan saja, namun kajian kelayakan terhadap penerapan program Desa Maritim perlu ditindaklanjuti secara teratur. Tentunya dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat juga dilibatkan, sehingga hasil evaluasi yang ada dapat digunakan sebagai acuan untuk dilakukannya perubahan baik dari segi strategi,

kebijakan, dan menjadikan kegagalan menjadi hal yang perlu untuk terus diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam proses kehidupan berdesa.

Pada akhirnya, perlu diakui dan disadari bahwa benar adanya relasi kuasa itu tidak selalu bersifat dominatif, tetapi juga perlu untuk produktif, sebagaimana disampaikan oleh Michel Foucault. Memahami kekuasaan tidak hanya terjebak dalam unsur pemaksaan atau menindas pihak lain, tetapi lebih khusus pada efek yang dihasilkan dari melibatkan peran kolaborasi, penyelarasan, dan perubahan dalam tindakan atau perilaku, serta pandangan dunia terhadap individu dan kelompok. Maksud dari relasi kuasa yang produktif dalam konteks program Desa Maritim adalah memahami kekuasaan yang dijalankan mampu berperan dalam pembentukan norma-norma, nilai-nilai pengetahuan, serta praktik-praktik program pembangunan tanpa mencabut masyarakat dari akar kehidupannya. Secara sederhana, relasi kuasa dapat dimaknai sebagai tonggak dalam menciptakan ruang-ruang aksi, dan penyesuaian serta transformasi bagi kehidupan berdesa. Pemerintah Kalurahan Tileng bersama-sama dengan masyarakat saling mempengaruhi dan berkolaborasi dalam penerapan program Desa Maritim, serta dituntut untuk saling memahami perubahan yang muncul dari proses relasi kuasa itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fenomena kontradiksi program Desa Maritim disebabkan oleh kurangnya pemahaman antara kebutuhan yang seharusnya dengan konteks dinamika masyarakat yang mayoritas petani, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan analisis relasi kuasa menunjukkan bahwa sekalipun pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengarahkan suatu program pembangunan, akan tetapi masyarakat juga punya kekuasaan tersembunyi dengan cara mereka sendiri melalui respon terhadap program bisa terjadi dalam bentuk apa saja yang dapat memicu ketimpangan kekuasaan antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat Kalurahan Tileng.

Selanjutnya, ketika logika proyek lebih dominan diimplementasikan dalam program Desa Maritim, maka hal tersebut akan menjadi sorotan kegagalan pemerintah dalam pembangunan. Kontradiksi akan teratasi, pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan akan tercapai apabila desa desa mampu refleksi dan merekonstruksi kembali paradigma pembangunan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pembangunan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat baik dalam perumusan, pengambilan keputusan, sampai pada

perencanaan dan penerapan program, sehingga dapat dipastikan bahwa program yang akan tercapai lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Hendaknya pemerintah desa dapat menanamkan pemahaman terhadap dinamika lokal, sehingga dapat membantu meminimalisir kontradiksi program pembangunan yang akan dilaksanakan.
3. Hendaknya program Desa Maritim dapat mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam pembangunan. Selain fokus pada upaya mendorong program Desa Maritim, perlu juga untuk mengamati aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang mayoritas petani di Kalurahan Tileng.
4. Hendaknya dalam proses penyelenggaraan pembangunan mampu menerapkan konsep relasi kuasa yang produktif, sebagaimana memiliki maksud dan tujuan yang baik yang mengedepankan kepentingan umum bukan sekedar kepentingan sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Azizah, S., & Sufa, N. 2016. Pendekatan Kritis dalam Penelitian Kualitatif: Studi Kasus pada Penelitian Sosial. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 19(2), 122-134.
- Fitriyani, R., & Huda, M. 2019. Pendekatan Kritis dalam Penelitian Kualitatif: Teori dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 20 (2), 123-135.
- Gonggong, A. 2020. Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia dengan Strategi Maritim Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*. 8 (2) : 33-52.
- Habbodin, Muhtar. M. Firdaus. 2022. “Kekuasaan dan Kedaulatan Memerintah”. *Governabilitas Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*. 3 (1).
- Heriyawati, Yanti, Een H., dan Ipit S. D. 2020. Kearifan Lokal Hajat Laut Budaya Maritim Pangandaran. *Journal: Pangung* 30 (2).
- Kurniawan, S., & Sunarsih, R. 2020. Grounded Theory Sebagai Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Humaniora*. 8 (2), 107-114
- Moeljadi, M., Adi K., dan Windu W. W. 2022. Peran Intelijen Maritim Guna Membangun Budaya Maritim Indonesia sebagai Pilar dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. 4 (5) : 5785-5795.
- Mukhlis, Suhardi, dan Rendra S. 2017. *Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman*. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. 2 (1) : 37-51.
- Nugroho, S. W. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Relasi Kuasa Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Studi kasus pengembangan ekowisata di Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*. 4 (1), 69-88.
- Patria, N. Arief, A. 1999. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Prasetya, M. N. 2018. Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan *Civil Society*. *Jurnal PIR: Power in International Relations*. 1 (2) : 176-187.

- Prasetyo, B., & Masyhuri, Y. 2021. Dinamika Relasi Kuasa Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Komunikasi Politik*. 6 (1), 42-60.
- Raharjo, M. M. 2020. *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Rahmawati, R., & Harahap, S. 2019. Grounded theory sebagai metode penelitian dalam studi sosial. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 2 (1), 27-34.
- Rira, N. 2018. *Metode Penelitian Sosial*. CV Budi Utama. Bandung.
- Sahdan, Gregorius. 2020. "Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality". *Governabilitas Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*. Vol. 1. No. 1.
- Salim, A. 2021. Pengaruh Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat Terhadap Semangat Bela Negara. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*. 9 (3): 263-280.
- Wirawan, Y., & Budiman, A. 2019. Dinamika Relasi Kuasa Dalam Kebijakan Pembangunan Desa: Studi kasus implementasi program padat karya tunai di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 8 (2), 103-122.
- Yunanto, S. E. 2021. Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat. *Governabilitas Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*. Vol. 2 No. 2.
- Yusuf, Rustam, Juli M., dan Dewi A. M. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Botutonuo Melalui Penguatan Budaya Maritim. *Jambura History and Culture Journal*. 4 (1) : 1-8.

Buku :

- Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (Eds.). 1991. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. University of Chicago Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). 2018. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Foucault, M. 1984. *The Foucault Reader*. Edited by Paul Rabinow. Pantheon Books.
- Pudjiastuti, T., & Wijayanti, A. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN

Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.

Tesis:

Melita. H. 2019. *Hegemoni Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Peraturan Perundang Undang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Urusan Keistimewaan DIY.

Situs Web:

<https://pijarkecillibrary.wordpress.com/2016/10/09/resensi-buku-senjatanya-orang-orang-yang-kalah-bentuk-bentuk-perlawanan-sehari-hari-kaum-tani/>

PANDUAN WAWANCARA

A. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku OPD Yang Mendampingi Secara Teknis “Desa Maritim” Di Kalurahan Tileng.

1. Apa yang mendasari pembuatan kebijakan pembangunan melalui program Desa Budaya Maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Siapa yang berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan mulai dari tahap awal sampai akhir penerapan program Desa Budaya Maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Kapan kebijakan pembangunan Desa Budaya Maritim itu dibuat dan diberlakukan?
4. Apa saja syarat-syarat diberikannya sebuah program Desa Budaya Maritim di suatu Kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Kabupaten mana saja yang dominan diterapkannya kebijakan pembangunan melalui program Desa Budaya Maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Bagaimana tinjauan keberhasilan suatu kebijakan pembangunan melalui program Desa Budaya Maritim dapat dijalankan dan diawasi?
7. Apa saja kontribusi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap program pembangunan melalui Desa Budaya Maritim?
8. Apa feedback yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Kalurahan yang diberikan program Desa Budaya Maritim?

9. Bagaimana pendapat Bapak tentang keberlangsungan program pembangunan Desa Budaya Maritim khususnya di wilayah Pesisir Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta?
10. Bagaimana pendapat Bapak dalam penerapan kebijakan pembangunan melalui program Desa Budaya Maritim dalam menjawab permasalahan sosial ekonomi masyarakat?
11. Bagaimana pendapat Bapak terhadap Kalurahan yang pola kehidupannya secara umum agraris, namun ditetapkan sebagai Desa Budaya Maritim?
12. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapan sebuah kebijakan terhadap Kalurahan-Kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul?

B. Pemerintah Kalurahan Tileng Dalam Mendorong Penerapan Program Desa Budaya Maritim Di Kalurahan Tileng.

1. Kapan Program Desa Budaya Maritim mulai direncanakan dan diterapkan di Kalurahan Tileng?
2. Mengapa Pemerintah Kalurahan Tileng dalam menjalankan kewenangan pembangunan memilih untuk menerapkan program Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng yang mana masyarakatnya mayoritas petani?
3. Apa yang menjadi alasan yang mendasar sehingga program-program tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat agraris di Kalurahan Tileng?

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program Desa Budaya Maritim tersebut?
5. Bagaimana proses penerapan program tersebut dan seperti apa dampaknya dalam kehidupan berdesa?
6. Dimana saja lokasi yang menjadi aspek pendorong aspek Penerapan Budaya Maritim di Kalurahan Tileng?
7. Seperti apa respon masyarakat terhadap penerapan program Desa Budaya Maritim?

C. Respon Masyarakat Agraris Terhadap Penerapan Program Desa Budaya Maritim Di Kalurahan Tileng.

1. Apakah bapak/ibu tahu dan terlibat dalam pelaksanaan program Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng?
2. Kapan program Desa Budaya Maritim tersebut diketahui masuk dan mulai diterapkan di Kalurahan Tileng?
3. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam upaya mendapatkan program Desa Budaya Maritim sampai pada pelaksanaannya?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait proses penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek pembangunan di Kalurahan Tileng kaitannya dengan Budaya Maritim?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kebijakan Budaya Maritim yang diterapkan di Kalurahan Tileng, apakah dampak keberhasilannya sudah bisa dirasakan?

6. Apakah bapak/ibu mengalami kendala dalam merespon upaya pembangunan melalui Budaya Maritim di Kalurahan Tileng?
7. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam merespon upaya pembangunan kaitannya dengan Budaya Maritim?

LAMPIRAN

	
<p>Foto bersama Analis DKP (Bpk. Arif Budiharja P. Putra)</p>	<p>Foto bersama Lurah Tileng (Bpk. Suwardi, S.Pd)</p>
	
<p>Foto Bersama Carik Tileng (Bpk. Edi Saraya, S.Pd)</p>	<p>Foto Bersama Tatalaksana Tileng (Bpk. Bondhan Gendoyono, S.T)</p>



Foto Bersama Ulu-ulu Tileng
(Ibu Wijiati, S.A.P)



Foto bersama Dukuh Teken
(Bpk. Sujarwo)



Foto bersama Dukuh Banagung
(Bpk. Rubyo)



Foto bersama Dukuh Ngerombo
(Bpk. Karsimin)



Foto Bersama BPKal
(Bpk. Wagita, S.Pt)



Foto bersama tokoh masyarakat
Mandesan
(Bpk. Supriadi)



Ketua Olahan Tiffany Food
(Ibu Worosastini)



Foto bersama tokoh masyarakat
Papringan
(Bpk/Ibu. Jumiran)



Foto bersama Ketua Olahan Mina Jaya
(Ibu Yuniati)



Foto bersama Tokoh Masyarakat Pugeran
(Bpk/Ibu. Sularno)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dislautkan

Jalan Sagan III/4 Yogyakarta, Telepon (0274) 512386, Faksimile (0274) 560386
Website: www.dislautkan.jogjaprov.go.id; Email: dislautkan@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Kepada:

Nomor : 423 / 7136

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Balasan Permohonan
Ijin Wawancara

Yth. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
di-
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 014/PEM/I/2023 tanggal 9 Januari 2023
perihal permohonan ijin wawancara mahasiswa atas nama sebagai berikut :

Nama : Irene Berta Meida Zalukhu
NIM : 19520123
Judul : Tinjauan Kritis Kebijakan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng
dilihat dari Perspektif Governing

Pada prinsipnya kami tidak keberatan sebagai Narasumber dalam penyusunan
skripsi dengan judul tersebut, mengingat Dinas Kelautan dan Perikanan DIY saat ini
adalah OPD Pengampu untuk Bantuan Keuangan Khusus atau BKK dengan tema
Budaya Maritim, yang bersangkutan dapat melakukan wawancara di Dinas Kelautan
dan Perikanan DIY dengan ketentuan berperilaku sopan, berpakaian rapi, menaati
ketentuan yang berlaku dan mematuhi protokol kesehatan serta dapat
menyampaikan hasil skripsi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
setelah penyusunan skripsi selesai.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP 19641103 199102 1001